

# LKjIP

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN BANJAR**

**TAHUN 2025**



B

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Banjar ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi atas kinerja Bakesbangpol Kabupaten Banjar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

Martapura, 13 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Banjar



**dr. H. Tofik Norman Hidayat**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19730319 200501 1 010



*Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stemple basah.*



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banjar 2025-2029 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sendiri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi ketahanan ideologi dan kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri. Badan Kesbangpol memiliki tiga sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik dan penguatan lembaga demokrasi di daerah
2. Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Analisa terhadap dua sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian pada tiga

sasaran strategis tersebut masuk pada kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 100 %.

Sasaran pertama yakni “Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik dan penguatan lembaga demokrasi di daerah” memiliki indikator Indeks Demokrasi Indonesia dengan target 80.15% dan realisasi 80,82% sehingga persentasenya adalah sebesar 100.8%. Untuk indikator ini pencapaiannya ditunjang melalui program :

- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Total pagu anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 7.037.780.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.451.753.338,- sehingga persentasenya adalah sebesar 91.67 persen. Sedangkan Sasaran yang Kedua “Meningkatnya Kapasitas dan Kontribusi Organisasi Kemasyarakatan” indikatornya berjumlah satu yakni Indeks Kinerja Ormas. Pada tahun 2025 target indikatornya adalah 72 persen dengan realisasi sebesar 74.17 persen sehingga persentasenya adalah sebesar 103 persen.

Indikator ini pencapaiannya ditunjang melalui Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dimana pagu anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 475.590.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 447.266.731 sehingga persentasenya adalah sebesar 94.04 persen. Pada Sasaran yang Ketiga “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” indikatornya berjumlah satu yakni Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 target indikatornya adalah 78,25 persen dengan realisasi sebesar 77.53 persen sehingga persentasenya adalah sebesar 99,07 persen.

Indikator ini pencapaiannya ditunjang melalui Program Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana pagu anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 5.783.994.445 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.225.737.605 sehingga persentasenya adalah sebesar 90.35 persen.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	1
C. ISU STRATEGIS.....	8
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>11</b>
A. TUJUAN PERANGKAT DAERAH.....	11
B. SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	12
C. PERJANJIAN KINERJA.....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>19</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	19
B. REALISASI ANGGARAN.....	93
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. KESIMPULAN.....	102
B. SARAN-SARAN.....	103

## DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 Jumlah ASN Badan Kesbangpol menurut golongan dan Pendidikan tahun 2025.....	7
TABEL 1. 2 Jumlah Pejabat Bakesbangpol menurut Esselon dan Golongan tahun 2025.....	8
TABEL 2. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan Bakesbangpol Kabupaten Banjar.....	11
TABEL 2. 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	13
TABEL 2. 3 Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah.....	15
TABEL 3. 1 Target dan Realisasi Tujuan.....	19
TABEL 3. 2 Skala Nilai Perangkat Daerah.....	21
TABEL 3. 3 Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	22
TABEL 3. 4 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya .....	43
TABEL 3. 5 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir Renstra (2026).....	50
TABEL 3. 6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 standar Provinsi dan Nasional.....	54
TABEL 3. 7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	68
TABEL 3. 8 Realisasi Jenis Belanja.....	94
TABEL 3.9 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	94
TABEL 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2025.....	99

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.....	6
GAMBAR 3. 1	Grafik Persentase Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibanding Target Periode Akhir (2030).....	42



### A. MAKSUD DAN TUJUAN

#### A.1 Maksud

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

#### A.2 Tujuan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

### B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

#### B.1 Tugas Pokok

Bakesbangpol mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### B.2 Fungsi

Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan

- demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
  5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
  6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol.
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **B.3 Dasar Hukum**

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187).
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1569).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, serta Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik.

17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, tambahan lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 4).
20. Peraturan daerah kabupaten banjar nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
21. Peraturan Bupati Banjar nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan bupati banjar nomor 46 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
23. SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar

#### **B.4 Struktur Organisasi**

Susunan organisasi SKPD terdiri dari:

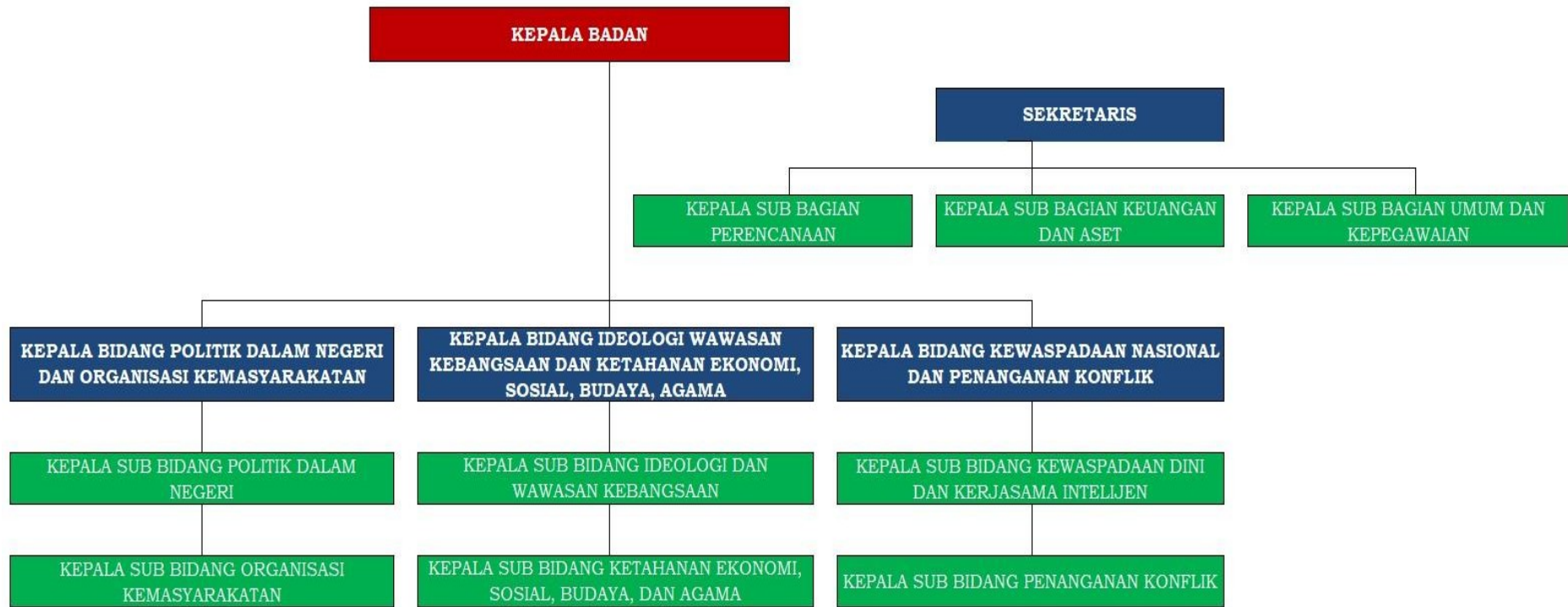
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perencanaan
  2. Sub Bagian Keuangan Dan Aset
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
  1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
  2. Sub Bidang Penanganan Konflik
- e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
  2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan



**SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANJAR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 24 DESEMBER 2021



**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar**



## B.5 Kepegawaian

Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada akhir tahun 2025 berjumlah 36 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 22 orang dan Non ASN sebanyak 14 orang.

Jumlah pegawai tersebut dirasakan masih kurang mengingat tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang cukup berat. Dengan keterbatasan jumlah personil tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap berupaya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi semaksimal mungkin.

Ragam tingkat pendidikan, kualifikasi, dan kompetensi personil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dijelaskan dalam tabel-tabel berikut:

- 1) Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Golongan dan Pendidikan.

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berdasarkan tingkat golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Badan Kesbangpol menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2025**

No	Jumlah Pegawai Menurut						Keterangan		
	Gol	Jumlah	%	Pendidikan	Jumlah	%	Jabatan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I	-	-	SD/SMP	-	-	Struktural	14	87.5
2.	II	0	0	SMA	3	10.34	Fungsional	2	12.5
3.	III	9	31.03	D3	2	6.89		-	-
4.	IV	7	24.13	D4/S1	18	62.06			
5.	V	1	3.44	S2	6	20.68			
6.	VIII	2	6.89						
7.	IX	10	34.48						
	<b>TOTAL</b>	29	100	<b>TOTAL</b>	29	100	<b>TOTAL</b>	16	100

- 2) Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Esselon dan Golongan

Jumlah ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berdasarkan tingkat eselon dan golongan pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pejabat Badan Kesbangpol menurut Esselon dan Golongan Tahun 2025**

No	Jumlah Pejabat Menurut					
	Esselon	Jumlah	%	Golongan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	II	1	8,33	III/a	3	17.64
2.	III	4	33.33	III/b	3	17.64
4.	IV	9	75	III/c	0	0
5.				III/d	4	23.52
6.				IV/a	6	35.29
7.				IV/b	1	5.88
				IV/c	0	0
<b>JUMLAH</b>		12	100		17	100

### C. ISU STRATEGIS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Isu Strategis merupakan permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*unresolved problem*). Identifikasi isu-isu tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah dan mendeteksi dini terhadap semua potensi konflik di daerah
2. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara maksimal
3. dalam rangka memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
5. Meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
6. Meningkatkan pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat.
7. Peningkatan peran daerah dalam mendukung upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Daftar Isi;

Daftar Tabel;

Daftar Gambar;

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas dan fungsi, dan isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja utama dan kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 beserta analisisnya

### Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi misi kepala daerah yang ada sesuai dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 maka Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banjar memiliki tujuan “Meningkatnya Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi”

Indikator tujuan adalah parameter atau ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu tujuan telah tercapai. Indikator ini harus jelas, terukur, dan relevan agar dapat digunakan dalam evaluasi kinerja. Indikator tujuan digunakan untuk mengukur keberhasilan SKPD dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator ini bersifat terukur dan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan serta program yang dilaksanakan. Bakesbangpol selaku Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki 2 indikator tujuan yakni “Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Kewaspadaan Nasional”. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah:

*Tabel 2.1*

*Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar*

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi	Indeks Harmoni Indonesia	6,55	6,66	6,77	6,88	6,99
		Indeks Kewaspadaan Nasional	85,33	85,53	85,73	85,93	86,13

## **B. SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Bakesbangpol Kabupaten Banjar berusaha turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar melalui RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025-2029. Bakesbangpol Kabupaten Banjar berkewajiban ikut mendukung terlaksananya misi pertama yaitu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar mengambil peran sebagai salah satu unsur pendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, khususnya di bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, serta ketahanan nasional di daerah. Keseluruhan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik ada 3 (tiga) indikator yakni :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
1.	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di suatu daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi, dinamika, dan tingkat perkembangan demokrasi di Kabupaten Banjar melalui pengukuran berbasis indikator yang terstandar secara nasional.	<p>a) Klasifikasi dan Kodefikasi Data: Tahap awal analisis dilakukan dengan menata seluruh temuan dari berbagai sumber ke dalam 22 indikator IDI. Setiap peristiwa, kebijakan, atau aktivitas sosial-politik yang ditemukan melalui dokumen resmi, pemberitaan media, atau hasil FGD dikategorikan ke dalam indikator yang sesuai berdasarkan tabel operasionalisasi IDI Banjar 2025.</p> <p>b) Pemberian Skor Aktual: Data diklasifikasi, setiap indikator diberi skor aktual (<math>X_i</math>) berdasarkan hasil kompilasi bukti lapangan, dokumen resmi, dan konfirmasi dari peserta FGD. Skor ini mencerminkan nilai kuantitatif dari kondisi demokrasi Kabupaten Banjar pada tahun 2025.</p> <p>c) Normalisasi Nilai Indikator: (rumus 1)</p> <p style="text-align: center;"><b>❖ Normalisasi Nilai Indikator</b></p> <p>atau, jika arah hubungan indikator negatif, maka</p> $I_i = 100 \times \frac{(X_{max} - X_i)}{(X_{max} - X_{min})}$ <p>Keterangan:  <math>I_i</math> = Nilai indeks indikator ke-<math>i</math>,  <math>X_i</math> = Nilai aktual indikator,  <math>X_{max}</math> = Nilai ideal (terbaik),  <math>X_{min}</math> = Nilai terburuk.</p> <p>d) Pembobotan Indikator dan Aspek: (rumus 2)</p> <p style="text-align: center;"><b>❖ Pembobotan Indikator dan Aspek</b></p> <p>Pembobotan dengan hasil <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP) yang ditetapkan BPS (2021). Bobot mencerminkan kontribusi relatif tiap indikator terhadap aspek demokrasi yang diwakilinya</p> $I_{aspek} = \sum_{i=1}^n (w_i \times I_i)$ <p>Pembobotan dengan hasil <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP) yang ditetapkan BPS (2021). Bobot mencerminkan kontribusi relatif tiap indikator terhadap aspek demokrasi yang diwakilinya.</p> <p>e) Bobot Aspek IDI Komposit: (1) Aspek Kesetaraan, Bobot 0,376, Peringkat 1; (2) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, Bobot 0,314, Peringkat 2; (3) Aspek Kebebasan, Bobot 0,310, Peringkat 3.</p> <p>f) Nilai Hasil Akhir: Kategori Tinggi (interval nilai &gt;80), Kategori Sedang (interval nilai 60 - 80), Kategori Rendah (interval nilai &lt;40)</p>
2.	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat (IKO) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat efektivitas, partisipasi, dan ketahanan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung stabilitas sosial politik di daerah. IKO disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu dimensi kerawanan, dimensi partisipasi, dan dimensi kelembagaan, yang secara bersama-sama mencerminkan kinerja dan peran ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	<p style="text-align: center;">IKO  <math>\sum 3</math> <i>Indeks dimensi</i></p> <p>Keterangan:  a) IKO : Indeks Ketahanan Ormas  b) Dimensi Kelembagaan : Menggambarkan kekuatan organisasi dari sisi legalitas, kepengurusan, dan program kerja.  c) Dimensi Partisipasi : Menunjukkan tingkat keterlibatan ormas dalam kegiatan sosial, politik, dan kemasyarakatan.  d) Dimensi Kerawanan : Menunjukkan tingkat potensi konflik, radikalisme, atau penyalahgunaan ormas (semakin rendah kerawanan, semakin tinggi nilainya).</p>
3.	Meningkatnya	Nilai SAKIP	Nilai Sakip PD adalah hasil	Nilai SAKIP PD = (P x 0,30) + (M x 0,30) + (L x 0,15) + (E x 0,25)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
	Akuntabilitas Kinerja	Perangkat Daerah	<p>pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta pencapaian sasaran kinerja suatu perangkat daerah berdasarkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja intern</p> <p>Nilai S akip PD merupakan indikator akuntabilitas dan kualitas manajemen kinerja yang menggambarkan sejauhmana PD mampu mengelola sumber daya publik untuk mencapai tujuan pemerintah daerah secara efektif dan efisien.</p> <p>Kategori penilaian :</p> <p>AA : &gt; 90 – 100 (Sangat Memuaskan)</p> <p>A : &gt; 80 – 90 (Memuaskan)</p> <p>BB : &gt; 70 – 80 (Sangat Baik)</p> <p>B : &gt; 60 – 70 (Baik)</p> <p>CC : &gt; 50 - 60 (Cukup Memadai)</p> <p>C : &gt; 30 – 50 (Kurang)</p> <p>D : &gt; 0 – 30 (Sangat Kurang)</p>	<p>Keterangan :</p> <p>P (Perencanaan Kinerja = Bobot 30%)</p> <p>M (Pengukuran Kinerja = Bobot 30%)</p> <p>L (Pelaporan Kinerja = Bobot 15%)</p> <p>E (Evaluasi akuntabilitas kinerja intern = Bobot 25%)</p>

Sumber : Surat Keputusan IKU SKPD

### C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029 dan pohon kinerja. Secara garis besar Perjanjian Kinerja tahun 2025 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target tahunan	Satuan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah	indeks Demokrasi Indonesia	<p>❖ <b>Normalisasi Nilai Indikator</b></p> <p>atau, jika arah hubungan indikator negatif, maka</p> $I_i = 100 \times \frac{(X_{max} - X_i)}{(X_{max} - X_{min})}$ <p>Keterangan:                      I<sub>i</sub>= Nilai indeks indikator ke-i,                      X<sub>i</sub>= Nilai aktual indikator,                      X<sub>max</sub>= Nilai ideal (terbaik),                      X<sub>min</sub>= Nilai terburuk.</p>	80,15	Nilai indeks	Prog	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,433,511,900	Kepala Badan
						Prog	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,691,975,000	Kepala Badan
						Prog	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	812,776,500	Kepala Badan
						Prog	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2,099,516,800	Kepala Badan
2	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	$IKO = \frac{\sum 3 \text{ Indeks dimensi}}{3}$	72	Nilai indeks	Prog	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	475,590,000	Kepala Badan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD = (P x 0,30) + (M x 0,30) + (L x 0,15) + (E x 0,25)	78,25	Nilai	prog	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,783,994,445	Kepala Badan
4	Meningkatnya kepatuhan dan Kinerja Intern perangkat daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	$\sum(\text{Perencanaan Kinerja } 30\% + \text{Pengukuran Kinerja } 30\% + \text{Pelaporan Kinerja } 15\% + \text{Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal } 25\%)$	84,86	Nilai	Prog	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,783,994,445	Sekretaris
	terkoordinirnya Penyusunan	Persentase Dokumen Perencanaan					Perencanaan, Penganggaran		

5	Dokumen Perangkat Daerah	,Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	$\frac{\sum \text{kegiatan yang terlaksana}}{\sum \text{kegiatan}} \times 100$	100	Persen	Keg	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,086,900	Kasubag Perencanaan
6	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	$\frac{\sum \text{kegiatan yang terlaksana}}{\sum \text{kegiatan}} \times 100$	100	persen	Keg	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,314,199,800	Kasubag keuangan
7	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	$\frac{\sum \text{Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas}}{\sum \text{Total dokumen administrasi kepegawaian}} \times 100$	100	persen	Keg	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	$\frac{\sum \text{lap dan berkas yg disusun tertib \& tepat waktu}}{\sum \text{Lap dan berkas yg disusun}} \times 100$	100	persen	Keg	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398,363,745	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	$\frac{\sum \text{Unit pengadaan Barang Milik Daerah}}{\sum \text{Unit pengadaan BMD yg direncanakan}} \times 100$	100	persen	Keg	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	286,502,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	$\frac{\sum \text{BMD yang mendapatkan pemeliharaan}}{\sum \text{BMD yg masuk target pemeliharaan}} \times 100$	100	persen	Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	404,538,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	$\frac{\sum \text{Jumlah Sarpras Sesuai Kebutuhan dan Berkualitas}}{\sum \text{Total sarpras yang dibutuhkan}} \times 100$	100	persen	Keg	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299,304,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	$\frac{\sum \text{Elemen masyarakat yang dibina}}{\sum \text{elemen masyarakat terget pembinaan}} \times 100$	100	Persen	prog	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,691,975,000	Kabid Ideologi dan ketahanan ekonomi,sosial,,b udaya,agama

13	Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di Bidang Ekososbud yang dikeluarkan sesuai standar	$\frac{\sum \text{Kebijakan ketahanan ekososbud agama}}{\sum \text{Target kebijakan ketahanan ekososbud agama}} \times 100$	100	persen	prog	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	812,776,500	Kabid Ideologi dan ketahanan ekonomi,sosial,,b udaya,agama
14	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	$\frac{\sum \text{masyarakat yang ikut dan paham}}{\sum \text{masyarakat yang mengikuti pembinaan}} \times 100$	80	Persen	keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,691,975,000	Kasubbid Ideologi dan wawasan Kebangsaan
15	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	$\frac{\sum \text{masyarakat yang ikut dan paham}}{\sum \text{masyarakat yang mengikuti pembinaan}} \times 100$	80	persen	keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	812,776,500	Kasubbid Ketahanan ekonomi,Sosial,Bu daya dan Agama
16	Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	$\frac{\sum \text{Total rekomendasi yg ditindak lanjuti}}{\sum \text{Rekomendasi FKUB}} \times 100$	100	Persen	Keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	812,776,500	Kasubbid Ketahanan ekonomi,Sosial,Bu daya dan Agama
17	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	$\frac{\sum \text{Kader yang Mengikuti Pendidikan Politik}}{\sum \text{Total Kader Partai Politik}} \times 100$	100	Persen	prog	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,433,511,900	Kabid politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
18	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	$\frac{\sum \text{Ormas yang Mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya}}{\sum \text{Ormas terdata di kabupaten Banjar}} \times 100$	40	Persen	prog	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	475,590,000	Kabid politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Sumber : Renja Perubahan Bakesbangpol Banjar Tahun 2025

19	Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat	Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang terlaksana	$\frac{\sum \text{Kegiatan pendidikan politik yang terlaksana}}{\sum \text{Kegiatan pendidikan politik yang direncanakan}} \times 100$	100	persen	Keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	2,433,511,900	Kasubbid Politik dalam Negeri
20	Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	$\frac{\sum \text{Ormas yang Mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya}}{\sum \text{Ormas terdata di kabupaten Banjar}} \times 100$	90,7	Persen	Keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	360,590,200	Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan
21	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{Potensi konflik sosial yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang terjadi}} \times 100$	100	Persen	prog	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2,099,516,800	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
22	Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	$\frac{\sum \text{masyarakat yang memahami}}{\sum \text{masyarakat yang mengikuti}} \times 100$	100	Persen	Keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,099,516,800	Plt Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
23	Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{penanganan potensi konflik sosial ditindaklanjuti}}{\sum \text{penanganan potensi konflik sosial yang dilakukan}} \times 100$	100	Persen	keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,099,516,800	Kasubbid Penanganan Konflik

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

**A.1 Target dan Realisasi Tujuan Tahun 2025**

*Tabel 3.1 Target dan Realisasi Tujuan*

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi	Indeks Harmoni Indonesia	6,55	Skor Indeks	6,67	101
	Indeks Kewaspadaan Nasional	85,13	Skor Indeks	73,36	86,17

Berdasarkan Tabel 3.1 Target dan Realisasi Tujuan Tahun 2025, capaian kinerja tujuan Meningkatkan Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi menunjukkan hasil yang cukup baik hingga sangat baik.

Indikator Indeks Harmoni Indonesia sebagai indikator utama tujuan tersebut pada Tahun 2025 memiliki target sebesar 6,55 skor indeks. Realisasi yang berhasil dicapai adalah 6,67 skor indeks, dengan tingkat capaian sebesar 101 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terlampaui, yang mengindikasikan kondisi sosial masyarakat yang relatif harmonis serta efektivitas peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kerukunan sosial di daerah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan strategis, antara lain fasilitasi dialog dan kerukunan antarumat beragama, penguatan wawasan kebangsaan, serta pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya.

Sementara itu, indikator Indeks Kewaspadaan Nasional pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 85,13 skor indeks, namun realisasi yang dicapai sebesar 73,36 skor indeks, dengan tingkat capaian 86,17 persen masuk kategori "Tinggi". Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator kewaspadaan nasional belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kewaspadaan nasional telah dilaksanakan secara optimal dan memberikan hasil yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi

tersebut dipengaruhi oleh masih adanya dinamika sosial, isu-isu strategis di masyarakat, serta potensi kerawanan yang berkembang secara dinamis, sehingga memerlukan penguatan peran kewaspadaan dini melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, pemantauan intensif terhadap perkembangan situasi daerah, serta optimalisasi fungsi forum-forum kewaspadaan dini dan jejaring informasi di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian tujuan Meningkatkan Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar upaya yang dilakukan telah memberikan hasil positif, khususnya dalam menjaga keharmonisan sosial. Namun demikian, hasil pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan strategi penguatan kewaspadaan dan pencegahan potensi konflik sosial pada periode perencanaan berikutnya.

## A.2 Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2025

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah Perjanjian kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk perjanjian kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 dan juga berdasarkan pencapaian target indikator sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam matriks program kegiatan pada dokumen Rencana Strategis SKPD. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut.

**Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah	indeks Demokrasi indonesia	Nilai indeks	80,15	80,82	100,8	Sangat tinggi
2	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	Nilai indeks	72	74.14	103	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78.25	77,53	99,07	Sangat tinggi
4	Meningkatnya kepatuhan dan Kinerja Intern perangkat daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	84,85	85,57	100,84	Sangat tinggi
5	terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	Sangat tinggi

6	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	100	100	Sangat tinggi
7	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	persen	100	100	100	Sangat tinggi
8	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	persen	100	100	100	Sangat tinggi
9	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	persen	100	100	100	Sangat tinggi
10	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	persen	100	100	100	Sangat tinggi
11	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	persen	100	100	100	Sangat tinggi
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	Sangat tinggi

13	Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di Bidang Ekosobud yang dikeluarkan sesuai standar	persen	100	100	100	Sangat tinggi
14	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	80	90.28	113	Sangat tinggi
15	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	persen	80	85.25	106.56	Sangat tinggi
16	Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	Sangat tinggi
17	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	100	100	100	Sangat tinggi

18	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	Persen	40	40,21	100,52	Sangat tinggi
19	Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat	Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang terlaksana	persen	100	100	100	Sangat tinggi
20	Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	Persen	90.7	91,68	101	Sangat tinggi
21	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	100	100	100	Sangat tinggi
22	Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Persen	100	100	100	Sangat tinggi
23	Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial	Persentase penanganann konflik sosial yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber Data : Badan Kesbangpol

## **1. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah**

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) yang bertujuan menilai tingkat perkembangan demokrasi di wilayah Kabupaten Banjar berdasarkan data dan peristiwa aktual. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Banjar Tahun 2025, diperoleh nilai 80,81, yang berarti melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 80,15. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Banjar berada pada kategori “Baik” dan telah memenuhi bahkan melebihi target pembangunan politik daerah.

Pada aspek kebebasan, indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat memperoleh nilai tertinggi sebesar 100%, yang mencerminkan situasi kebebasan sipil yang kondusif. Namun demikian, indikator pemenuhan hak-hak pekerja masih menjadi aspek yang perlu ditingkatkan dengan nilai terendah sebesar 61,50%.

Pada aspek kesetaraan, indikator partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan serta anti monopoli sumber daya ekonomi mencapai nilai tertinggi 100%, sedangkan indikator kesetaraan gender masih relatif rendah dengan nilai 68,52%, khususnya terkait keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Sementara itu, pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, indikator kinerja birokrasi dalam pelayanan publik memperoleh nilai tertinggi sebesar 100%, sedangkan indikator kinerja lembaga legislatif menjadi yang terendah dengan nilai 45,95%, sehingga memerlukan penguatan peran dan fungsi lembaga perwakilan. Secara keseluruhan, aspek kesetaraan menjadi penyumbang nilai tertinggi dengan skor 87,02, disusul aspek kebebasan sebesar 82,54 dan kapasitas lembaga demokrasi sebesar 71,68. Hasil ini menegaskan bahwa target IDI Kabupaten Banjar Tahun 2025 telah tercapai dan terlampaui, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam memperkuat kualitas demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

## **2. Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan**

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah Indeks Kinerja Ormas (IKO) yang digunakan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hasil evaluasi IKO Kabupaten Banjar sebesar 74,17%, sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 72 dan berada pada kategori “Baik” atau “Emergent (Berkembang)”.

Komposisi pembentuk IKO menunjukkan Dimensi Kerawanan sebagai penyumbang tertinggi (82,50%), diikuti Dimensi Partisipasi (73,75%), sementara Dimensi Kelembagaan masih menjadi yang terendah (66,26%). Berdasarkan bidang, kontribusi IKO tertinggi berasal dari bidang pendidikan (80,10%) dan bidang kesehatan (79,83%), sedangkan bidang sosial menjadi yang terendah dengan indeks 72,05%, namun tetap berada pada kategori Baik.

## **3. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dipublikasikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebesar 77,53 dengan predikat “BB” (Sangat Baik). Capaian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah diimplementasikan secara baik dan konsisten, meskipun belum sepenuhnya mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 78,25.

Hasil evaluasi menggambarkan bahwa perencanaan kinerja telah tersusun dengan baik dan selaras melalui mekanisme cascading serta memperhatikan keterkaitan antarbidang, dengan capaian nilai 24,70 dari nilai maksimal 30. Pelaporan kinerja juga menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai 12,06 dari 15, di mana LKjIP telah disusun dan digunakan sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja, meskipun pemanfaatannya dalam penyesuaian perencanaan tahun berikutnya masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, pada aspek pengukuran kinerja yang memperoleh nilai 22,13 dari 30, masih ditemukan beberapa kelemahan, antara lain ketidaksinkronan data capaian kinerja antara laporan triwulanan dan aplikasi SIMONDALEV serta belum optimalnya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja. Pada aspek evaluasi akuntabilitas

kinerja internal, capaian nilai 18,63 dari 25 menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi internal telah berjalan, namun perlu penguatan dari sisi kualitas sumber daya manusia, kedalaman evaluasi, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

#### **4. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Internal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesbangpol” dimana pada tahun 2025 target kinerjanya adalah nilai indeks sebesar 84,86 poin dan nilai capaian yang diterima Badan Kesbangpol pada penilaian IKKI tahun 2025 adalah sebesar 85,57 poin yang artinya persentase capaian pada program ini adalah sebesar 100,83 persen dengan predikat pelaksanaan “Sangat Tinggi”. Pemenuhan 2 unsur dalam kertas kerja IKKI yaitu komponen kepatuhan dan kinerja pelayanan publik untuk menilai tata kelola, manajemen resiko dan kematangan sistem pengendalian Bakesbangpol. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah bertujuan untuk :

- Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penilaian mandiri telah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- Memperoleh gambaran Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah yang sebenarnya dan dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, kepatuhan dan kualitas pelayanan publik;
- Memberikan saran dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja dan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

#### **5. Sasaran Kinerja Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan” dengan perhitungan jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang berhasil disusun dibagi jumlah dokumen yang ditargetkan untuk disusun, dimana targetnya adalah 100% atau sebanyak 37 dokumen, dengan realisasi 37 dokumen yang berhasil disusun sehingga capaiannya adalah sebesar 100 persen.

Komponen 37 dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025, Renja Tahun 2026 (Ranwal), Renja Perubahan Tahun 2025, Perjanjian

Kinerja Perubahan Tahun 2025, Rencana Aksi Kinerja Perubahan Tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2030, RKA Tahun 2026, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA Murni Tahun 2026, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, LPPD Tahun 2024, LKJIP Tahun 2024, LKPJ Tahun 2024, 19 laporan hasil evaluasi kinerja, dokumen Walidata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta dokumen Data Statistik Sektorial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Seluruh dokumen tersebut disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang terintegrasi. Tersusunnya seluruh dokumen secara lengkap dan tepat waktu menunjukkan konsistensi penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga capaian indikator mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan.

#### **6. Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah persentase laporan keuangan perangkat daerah. Capaian indikator kinerja persentase laporan keuangan perangkat daerah sebesar 100 persen diperoleh dari terpenuhinya seluruh komponen dokumen keuangan yang menjadi objek pengukuran indikator. Komponen tersebut meliputi laporan keuangan akhir tahun, laporan keuangan semesteran, laporan keuangan triwulanan, dan laporan keuangan bulanan, serta pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, termasuk penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN. Seluruh komponen dokumen tersebut telah disusun secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan serta spesifikasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah seluruh komponen dokumen keuangan yang wajib disusun dengan jumlah komponen dokumen keuangan yang berhasil disusun, diverifikasi, dan dinyatakan memenuhi ketentuan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa seluruh komponen dokumen keuangan yang ditargetkan telah terpenuhi tanpa pengecualian, sehingga realisasi indikator mencapai 100 persen. Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan perangkat daerah telah dilaksanakan secara tertib administrasi, patuh regulasi, dan akuntabel.

## **7. Lancarnya administrasi kepegawaian perangkat daerah**

Sasaran strategis “Lancarnya administrasi kepegawaian perangkat daerah” diukur melalui indikator Persentase administrasi kepegawaian yang berkualitas. Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 100 persen, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen dan berada pada kategori sangat baik.

Capaian tersebut terutama didukung oleh keberhasilan pemenuhan target peningkatan kapasitas aparatur melalui keikutsertaan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat/bimbingan teknis). Dari target sebanyak 6 orang pegawai, realisasi yang dicapai juga sebanyak 6 orang pegawai yang telah mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Penatausahaan Keuangan dan Aset pada Aplikasi SIPD RI, yang diikuti oleh:
  - Drs. Wasis Nugraha
  - Ratna Sari Rahayu, A.Md
  - Hanisah, S.Pd.I

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset berbasis sistem informasi pemerintah daerah.

2. Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang diikuti oleh Jumaliah, S.M, guna meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan pelayanan.
3. Bimbingan Teknis Perhitungan Penilaian IPASN, juga diikuti oleh Jumaliah, S.M, untuk memperkuat pemahaman terhadap sistem penilaian profesionalitas aparatur sipil negara.
4. Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah Government Transformation Academy – Digital Talent Scholarship 2025, yang diikuti oleh:
  - Akhmad Yusniansyah Iryawan, S.E
  - Muhammad Subhan, S.Ag

Kegiatan ini mendukung peningkatan kompetensi digital aparatur dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintahan.

## **8. Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas sebesar 100 persen diperoleh dari terpenuhinya seluruh laporan administrasi umum yang

menjadi kewajiban pada periode pelaporan. Penyelenggaraan penunjang administrasi umum yang berkualitas diukur berdasarkan laporan administrasi umum yang meliputi surat-menyurat, pengelolaan arsip, serta laporan kegiatan administrasi umum lainnya yang disusun sesuai dengan standar dan kriteria kualitas yang telah ditetapkan.

Seluruh laporan administrasi umum yang wajib disusun telah dipenuhi secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, baik dari aspek format, kelengkapan substansi, ketepatan prosedur, maupun ketertiban administrasi. Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan administrasi umum yang memenuhi kriteria kualitas dengan jumlah laporan administrasi umum yang ditargetkan untuk disusun, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh laporan yang ditargetkan telah memenuhi standar kualitas.

Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 100 persen, yang mencerminkan bahwa penyelenggaraan administrasi umum telah dilaksanakan secara tertib, konsisten, dan akuntabel, serta mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara optimal.

## **9. Sasaran Kinerja Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah**

Pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah diukur melalui indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan yang berkualitas. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pada Tahun Anggaran 2025, target pengadaan ditetapkan sebesar 100 persen dan seluruh pengadaan dapat direalisasikan sebesar 100 persen, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan telah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan perangkat daerah.

Pada anggaran murni, pengadaan difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana utama gedung kantor, antara lain berupa locker besi, CCTV, kursi kerja dan kursi tamu, serta pendingin ruangan (AC). Sarana dan prasarana tersebut berperan penting dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan efektivitas lingkungan kerja. Selanjutnya, pada anggaran perubahan, dilakukan pengadaan tambahan untuk melengkapi kebutuhan yang belum terpenuhi serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan organisasi, meliputi dispenser, lemari arsip, lemari display, dan televisi LED.

## **10. Sasaran Kinerja Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat daerah**

Indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas sebesar 100 persen diperoleh dari terpenuhinya seluruh laporan jasa penunjang pelayanan umum kantor yang menjadi kewajiban pada periode pelaporan. Jasa penunjang pelayanan umum yang dimaksud mencakup penyelenggaraan layanan pendukung operasional kantor, termasuk pembayaran gaji tenaga non-ASN, serta layanan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Seluruh laporan jasa penunjang pelayanan umum telah disusun secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek administrasi, kelengkapan dokumen pendukung, maupun ketepatan prosedur. Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan jasa penunjang yang memenuhi kriteria kualitas dengan jumlah laporan jasa penunjang yang ditargetkan untuk disusun, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh laporan yang ditargetkan telah terpenuhi.

Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 100 persen, yang mencerminkan bahwa penyelenggaraan jasa penunjang pelayanan umum, termasuk pengelolaan pembayaran gaji tenaga non-ASN, telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan berkualitas, serta memberikan dukungan optimal terhadap operasional dan pelayanan perangkat daerah.

## **11. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja "Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas" sebesar 100 persen diperoleh dari terpenuhinya seluruh kebutuhan sarana dan prasarana barang milik daerah (BMD) sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan unit BMD yang tersedia, terpelihara, dan memenuhi standar kualitas, yaitu berfungsi dengan baik serta layak digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia, sesuai kebutuhan, dan memenuhi standar kualitas dengan jumlah total kebutuhan sarana dan prasarana (BMD). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa seluruh unit sarana dan prasarana yang

dibutuhkan telah terpenuhi dan berada dalam kondisi baik, sehingga realisasi indikator mencapai 100 persen. Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan barang milik daerah telah dilaksanakan secara tertib, efektif, dan akuntabel, serta mampu mendukung kinerja perangkat daerah secara optimal.

## **12. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Indikator kinerja Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar 100 persen diperoleh dari terlaksananya seluruh kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang menjangkau empat elemen masyarakat sasaran, yaitu Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/Kecamatan, Anggota Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat. Keterjangkauan elemen masyarakat tersebut tercermin dari pelaksanaan berbagai kegiatan, antara lain Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Banjar yang melibatkan perwakilan suku-suku se-Kabupaten Banjar, sosialisasi peraturan perundang-undangan di Desa Panyiuran, Desa Baliangin, dan Desa Kalampayan, serta sosialisasi wawasan kebangsaan di Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Mataraman.

Selain itu, penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan juga dilakukan melalui Sosialisasi Pembauran Kebangsaan tentang Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Banjar Periode 2025–2029, Sosialisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan 45, Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila, serta Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Capaian indikator ini semakin diperkuat dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2025, yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor.

Dengan terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan tersebut dan tercapainya seluruh elemen masyarakat sasaran sesuai dengan komponen indikator yang ditetapkan, maka cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan pada triwulan keempat mencapai 100 persen, sehingga persentase capaian indikator kinerja pada sasaran ini juga sebesar 100 persen.

## **13. Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat**

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang disusun sesuai dengan

ketentuan dan standar penyusunan kebijakan terhadap jumlah keseluruhan kebijakan yang dihasilkan pada periode berjalan. Pada Tahun 2025, kebijakan yang dihasilkan pada bidang tersebut berjumlah 1 (satu) kebijakan, yang sekaligus menjadi target kebijakan yang harus disusun pada tahun berjalan.

Kebijakan dimaksud yaitu Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kebijakan ini telah disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melalui tahapan penyusunan kebijakan yang dipersyaratkan, mulai dari perencanaan, koordinasi lintas sektor dan pembahasan substansi.

Seluruh proses penyusunan kebijakan tersebut telah memenuhi standar kualitas kebijakan yang baik, baik dari aspek kesesuaian kewenangan daerah, keterpaduan dengan kebijakan nasional dan daerah, maupun kejelasan pengaturan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, jumlah kebijakan yang disusun sesuai ketentuan sama dengan jumlah kebijakan yang ditargetkan pada periode berjalan.

Berdasarkan hasil perhitungan indikator, realisasi kinerja mencapai 100 persen, karena 1 kebijakan yang ditargetkan telah sepenuhnya terpenuhi dan memenuhi standar penyusunan kebijakan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah dalam perumusan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan berkualitas, serta mampu menghasilkan kebijakan yang siap diimplementasikan dan mendukung tujuan pembangunan daerah.

#### **14. Sasaran Kinerja Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah peserta yang dinyatakan memahami materi pembinaan dengan jumlah total peserta yang mengikuti kegiatan.

Pada tahun 2025, target indikator kinerja ditetapkan sebesar 80 persen. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian realisasi indikator kinerja mencapai 90,28 persen, sehingga persentase capaian kinerja terhadap target adalah

sebesar 113 persen. Capaian tersebut diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol sepanjang tahun 2025. Jumlah sasaran yang ditetapkan dalam kegiatan tersebut sebanyak 350 orang, dengan jumlah peserta yang dinyatakan memahami materi sebanyak 316 orang.

Dengan demikian, tingkat pemahaman peserta mencapai 90,28 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Capaian ini mencerminkan ketepatan metode penyampaian materi serta tingginya partisipasi dan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.

#### **15. Sasaran Kinerja Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah peserta yang dinyatakan memahami materi pembinaan dengan jumlah total peserta yang mengikuti kegiatan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Pada tahun 2025, target indikator kinerja ditetapkan sebesar 80 persen. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan, capaian realisasi indikator kinerja mencapai 85,25 persen, sehingga persentase capaian kinerja terhadap target adalah sebesar 106 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan berhasil terlampaui.

Capaian tersebut diperoleh dari pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan, salah satunya melalui Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan sekolah. Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan, telah dilakukan evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Evaluasi dilaksanakan melalui instrumen penilaian yang mencakup pemahaman mengenai jenis-jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan fisik dan mental, aspek hukum, serta peran peserta dalam upaya pencegahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta berada pada kategori baik hingga sangat baik. Pada pelaksanaan kegiatan di SMP Negeri 1

Martapura, tingkat pemahaman siswa pada kegiatan pertama mencapai 87 persen, yang mencerminkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami materi P4GN secara komprehensif, khususnya terkait bahaya narkoba dan pentingnya sikap menolak penyalahgunaan narkoba. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam sesi diskusi dan tanya jawab, serta kemampuan dalam mengidentifikasi potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.

Selanjutnya, hasil evaluasi di SMP Negeri 1 Mataraman menunjukkan tingkat pemahaman sebesar 81 persen, yang menandakan bahwa mayoritas peserta telah memiliki pengetahuan dasar yang baik mengenai P4GN, meskipun masih diperlukan penguatan lanjutan, terutama pada aspek pencegahan berbasis lingkungan dan penguatan karakter. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan respon yang positif melalui keterlibatan aktif dalam simulasi dan diskusi kelompok.

Adapun pelaksanaan kegiatan di SMP Negeri 2 Martapura menunjukkan tingkat pemahaman peserta sebesar 84 persen, yang berada pada kategori baik. Penyampaian materi yang disertai contoh kasus, penggunaan media audiovisual, serta pendekatan komunikatif terbukti mampu meningkatkan daya serap peserta terhadap materi yang diberikan. Selain itu, peserta mulai menunjukkan kesadaran akan peran mereka sebagai pelajar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari narkoba.

Pada pelaksanaan lanjutan kegiatan di SMP Negeri 1 Martapura, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan tingkat pemahaman peserta menjadi 89 persen. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa metode penyampaian materi yang berkelanjutan, interaktif, dan kontekstual mampu memperkuat pemahaman peserta secara signifikan. Peserta tidak hanya memahami bahaya narkoba, tetapi juga menunjukkan sikap positif serta komitmen untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, capaian tingkat pemahaman peserta pada seluruh rangkaian kegiatan pembinaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya melalui kegiatan sosialisasi P4GN, telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif. Kegiatan ini berkontribusi nyata dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta sikap preventif peserta terhadap berbagai potensi ancaman sosial, sekaligus mendukung pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

## **16. Sasaran Kinerja Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindaklanjuti. Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi resmi yang disampaikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara nyata oleh Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2025, target indikator kinerja ditetapkan sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut rekomendasi FKUB, capaian realisasi indikator kinerja mencapai 100 persen, sehingga persentase capaian kinerja terhadap target juga sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi FKUB yang disampaikan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian tersebut diperoleh antara lain dari pelaksanaan rapat dan pengumpulan data lapangan FKUB Kabupaten Banjar terkait rencana pendirian tempat ibadah di Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, yang dilaksanakan pada 12 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan rekomendasi FKUB dalam rangka pencegahan potensi konflik sosial dan keagamaan.

Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan lapangan, FKUB melakukan klarifikasi terhadap kondisi faktual di lokasi, termasuk status penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah, jumlah jemaat, serta respon masyarakat sekitar. Dalam rapat tersebut, FKUB juga menyampaikan penegasan agar setiap rencana pendirian rumah ibadah wajib mematuhi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, khususnya terkait persyaratan administratif dan sosial kemasyarakatan. Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada pihak terkait dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui langkah pembinaan, koordinasi lintas pihak, serta pengawasan di tingkat desa dan kecamatan.

Dengan ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi FKUB secara konkret, pelaksanaan indikator kinerja ini menunjukkan bahwa fungsi FKUB sebagai mediator dan pemberi rekomendasi dalam menjaga kerukunan umat beragama serta mencegah potensi konflik sosial telah berjalan efektif dan optimal. Capaian ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara FKUB dan Pemerintah Daerah dalam

menciptakan kondisi kehidupan beragama yang rukun, tertib, dan kondusif di Kabupaten Banjar.

#### **17. Sasaran Kinerja Meningkatnya etika dan budaya politik**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah *“Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik”*. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah partai politik penerima bantuan keuangan yang telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi kadernya dengan jumlah seluruh partai politik penerima bantuan keuangan pada periode yang sama, kemudian dikalikan 100 persen.

Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100 persen dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga tingkat capaian terhadap target mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh partai politik penerima bantuan keuangan telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebanyak 11 (sebelas) partai politik penerima bantuan keuangan di Kabupaten Banjar pada Tahun 2025 telah merealisasikan kegiatan pendidikan politik bagi kader dan masyarakat, yaitu:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
2. Partai Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
4. Partai NasDem
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
7. Partai Amanat Nasional (PAN)
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9. Partai Demokrat
10. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia)
11. Partai Bulan Bintang (PBB)

Capaian ini diperoleh setelah seluruh partai politik tersebut menerima realisasi bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banjar dan menggunakan dana tersebut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Dengan terlaksananya pendidikan politik oleh seluruh partai politik penerima bantuan keuangan, maka sasaran peningkatan kualitas pemahaman dan partisipasi

politik masyarakat di Kabupaten Banjar dapat tercapai secara optimal.

#### **18. Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan**

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya” dimana target indikator tersebut pada tahun ini adalah 40 persen, dengan realisasi 40,21 persen. Sehingga capaian pada indikator ini adalah 100,5 persen. Perhitungannya yaitu jumlah ormas yang aktif yang melaporkan keberadaannya di Bakesbangpol Kabupaten Banjar dibagi dengan jumlah seluruh Ormas di Kabupaten Banjar x 100. Jumlah ormas yang aktif melaporkan keberadaannya sampai dengan triwulan IV yaitu 300 dibagi dengan jumlah ormas keseluruhan 746 x 100 = 40,21%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap Ormas telah berjalan sesuai dengan rencana, serta mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Ormas dalam memenuhi kewajiban pelaporan keberadaan organisasi kepada pemerintah daerah.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan, pendataan, dan monitoring terhadap Ormas telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Selain itu, capaian tersebut juga mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan dalam memenuhi kewajiban administratif berupa pelaporan keberadaan organisasi kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib organisasi dan stabilitas sosial di Kabupaten Banjar.

#### **19. Sasaran Kinerja Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat**

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang terlaksana dengan jumlah seluruh kegiatan yang direncanakan dalam periode berjalan, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100 persen, dengan realisasi sebesar 100 persen, sehingga persentase capaian terhadap target mencapai 100 persen. Hasil ini diperoleh dari total 13 kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang direncanakan, dengan 13 kegiatan yang telah terlaksana. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan dan warga di Kecamatan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan dan pendidikan politik berjalan efektif dan mampu melampaui

target yang ditetapkan pada tahun ini.

Capaian tersebut diperoleh dari total 13 kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang telah direncanakan, dimana seluruhnya atau 13 kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi sosialisasi dan pendidikan politik yang ditujukan kepada berbagai unsur masyarakat, antara lain partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat di tingkat kecamatan.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi, sekaligus memperkuat peran aktor-aktor politik dan sosial dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan daerah.

Dengan terlaksananya seluruh kegiatan yang direncanakan, capaian ini menunjukkan bahwa program pembinaan dan pendidikan politik telah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan pada tahun berjalan.

## **20. Sasaran Kinerja Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah *“Persentase Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang memiliki izin atau legalitas”*. Pada tahun berjalan, target indikator ini ditetapkan sebesar 90,7 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 91,68 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101 persen, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah Ormas yang telah memiliki legalitas, baik yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri maupun di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan jumlah seluruh Ormas yang ada di Kabupaten Banjar, kemudian dikalikan 100 persen. Dari total 746 Ormas yang tercatat di Kabupaten Banjar, sebanyak 684 Ormas telah memiliki legalitas resmi, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

$$684 \div 746 \times 100\% = 91,68\%$$

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banjar telah memiliki legalitas formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Ormas dalam memenuhi persyaratan administratif dan hukum, serta mendukung terwujudnya tertib organisasi dan stabilitas sosial di daerah.

## **21. Sasaran Kinerja Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah “Persentase konflik sosial yang diselesaikan”. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kejadian atau situasi yang berpotensi menjadi konflik sosial—yang diperoleh dari hasil pemetaan wilayah, laporan masyarakat, intelijen daerah, serta forum deteksi dini—dengan jumlah seluruh potensi konflik yang teridentifikasi pada periode yang sama, kemudian dikalikan 100 persen.

Pada Tahun 2025, target kinerja indikator ini ditetapkan sebesar 100 persen, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh potensi konflik sosial yang teridentifikasi selama tahun berjalan telah berhasil ditangani secara tuntas.

Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan koordinasi lintas sektor yang efektif antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dengan unsur Forkopimda, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta perangkat daerah terkait. Melalui mekanisme deteksi dini, pemantauan lapangan, dan langkah-langkah fasilitasi penyelesaian secara cepat dan tepat, potensi konflik dapat diredam sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka di tengah masyarakat.

## **22. Sasaran Kinerja Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah “Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen”. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah peserta yang diberikan pemahaman terkait kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen dengan jumlah peserta yang ditargetkan pada periode berjalan, kemudian dikalikan 100 persen.

Pada Tahun 2025, target kinerja indikator ini ditetapkan sebesar 100 persen dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian ini menggambarkan bahwa kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan fasilitasi kewaspadaan dini telah dilaksanakan secara optimal dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk masyarakat, aparat desa, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Partisipasi aktif para pihak tersebut berperan penting dalam

meningkatkan pemahaman terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu stabilitas dan ketenteraman daerah.

Dengan terlaksananya seluruh kegiatan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen sesuai rencana, upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi risiko di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

### **23. Sasaran Kinerja Meningkatnya tindak lanjut penanganan potensi konflik sosial**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah “Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti”. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas sistem deteksi dini dan respons pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap potensi konflik sosial yang muncul di masyarakat, khususnya melalui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Pada Tahun 2025, target kinerja indikator ini ditetapkan sebesar 100 persen, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh potensi konflik sosial yang teridentifikasi selama tahun berjalan telah ditindaklanjuti secara optimal.

Kesbangpol secara konsisten, termasuk pada Triwulan II dan periode lainnya, telah merespons setiap potensi konflik yang muncul melalui langkah-langkah koordinatif, klarifikasi lapangan, serta fasilitasi penyelesaian bersama para pemangku kepentingan. Proses ini melibatkan unsur FKDM, FKUB, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi.

Capaian ini mencerminkan bahwa mekanisme deteksi dini dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Banjar telah berjalan secara efektif, sehingga mampu mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas, persatuan, serta kesatuan bangsa di daerah.

### **A.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja dengan periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari periode sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan

periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

No.	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai indeks	80,82	100,8	N/a	N/a	N/a	N/a	Tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak menjadi sasaran kinerja
2	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	Nilai indeks	74.14	103	N/a	N/a	N/a	N/a	Tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak menjadi sasaran kinerja
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,53	99,07	78.14	N/a	72.65	N/a	

4	Meningkatnya kepatuhan dan Kinerja Intern perangkat daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	85,57	100,84	84.85	111.64	79.18	107	
5	terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan ,Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
7	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	persen	100	100	100	100	100	100	
8	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	persen	100	100	100	100	100	100	
9	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Lancarnya Jasa Penunjang	Persentase Jasa Penunjang	Persen	100	100	100	100	100	100	

	Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum yang Berkualitas								
11	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	Persen	100	100	94.44	94.44	100	100	
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di Bidang Ekososbud yang dikeluarkan sesuai standar	Persen	100	100	N/a	N/a	N/a	N/a	Tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak menjadi sasaran kinerja
14	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	90.28	113	N/a	N/a	N/a	N/a	Tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak menjadi sasaran kinerja
15	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan	Persen	85.25	106.56	N/a	N/a	N/a	N/a	Tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak menjadi sasaran kinerja

	ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	ekonomi, sosial dan budaya								
16	Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	N/a	N/a	N/a	N/a	Tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak menjadi sasaran kinerja
17	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	100	100	100	100	100	100	
18	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	Persen	40.21	100.52	36.07	n/a	34.8	n/a	
19	Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat	Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	
20	Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	persen	91.68	101	28.2	n/a	26.8	n/a	
21	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	<b>persen</b>	100	100	100	100	100	100	
22	Meningkatnya	Persentase pemahaman masyarakat yang	<b>persen</b>	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	Tidak dapat dibandingkan dengan tahun

	kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen								sebelumnya karena tidak menjadi sasaran kinerja
<b>23</b>	Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial	Persentase penanganann konflik sosial yang ditindaklanjuti	<b>persen</b>	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Bakesbangpol dan Parpol

Secara umum, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar pada Tahun 2025 menunjukkan tren kinerja yang positif dan relatif stabil apabila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 dan 2024. Hal ini tercermin dari peningkatan dan konsistensi capaian pada masing-masing sasaran strategis yang mendukung terwujudnya stabilitas politik, sosial, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pada sasaran meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di daerah, kinerja yang diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada Tahun 2025 mencapai nilai 80,82 dengan tingkat capaian 100,8 persen. Capaian ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan mengindikasikan adanya penguatan praktik demokrasi di daerah. Dibandingkan dengan Tahun 2023 dan 2024 yang belum memiliki data pembandingan yang terukur dalam periode pelaporan, capaian Tahun 2025 menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan pada urusan kesatuan bangsa dan politik.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan, kinerja yang diukur melalui Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 74,14 dengan capaian 103 persen. Meskipun belum tersedia data pembandingan pada Tahun 2023 dan 2024, capaian ini mencerminkan meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mendukung ketertiban umum, partisipasi masyarakat, serta ketahanan sosial. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap ormas telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dari Tahun 2023 hingga Tahun 2024. Nilai SAKIP pada Tahun 2023 tercatat sebesar 72,65, meningkat pada Tahun 2024 menjadi 78,14. Pada Tahun 2025, nilai SAKIP berada pada angka 77,53 dengan capaian 99,07 persen. Meskipun terdapat penurunan tipis dibandingkan Tahun 2024, capaian Tahun 2025 tetap berada pada kategori baik dan menunjukkan konsistensi penerapan sistem perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil. Penurunan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan penguatan implementasi kinerja pada tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah, yang diukur melalui Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, capaian kinerja menunjukkan tren meningkat secara berkelanjutan. Pada Tahun 2023, realisasi indeks sebesar 79,18 dengan capaian 107 persen, meningkat pada Tahun 2024 menjadi 84,85 dengan capaian 111,64 persen, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 dengan realisasi 85,57 serta capaian 100,84 persen. Capaian ini mencerminkan semakin baiknya kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengendalian internal, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas demokrasi, penguatan peran organisasi kemasyarakatan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan tata kelola internal perangkat daerah. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan kinerja dan strategi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

#### A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Akhir Renstra

Indikator kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode 2025-2029. Pencapaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

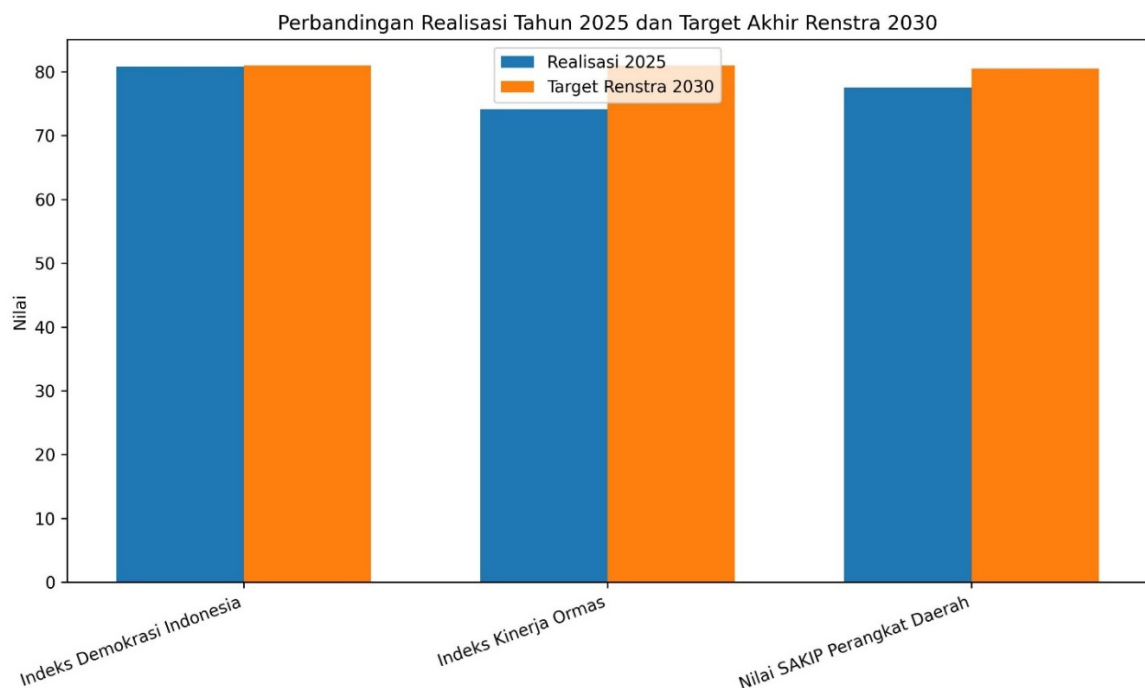
**Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir Renstra (2026)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025 (%)	Target Periode Akhir Renstra (2030) %	Capaian Periode Akhir Renstra (2026) %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai indeks	80.82	81	99.78
2	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	Nilai indeks	74.14	81	91.53
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.53	80.5	96.31
4	Meningkatnya kepatuhan dan Kinerja Intern perangkat daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	85.57	85	100.67
5	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100.00
6	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	100	100.00
7	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	persen	100	100	100.00
8	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	persen	100	100	100.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025 (%)	Target Periode Akhir Renstra (2030) %	Capaian Periode Akhir Renstra (2025) %
9	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	Persen	100	100	100.00
10	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	Persen	100	100	100.00
11	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	Persen	100	100	100.00
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100.00
13	Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di Bidang Ekososbud yang dikeluarkan sesuai standar	Persen	100	100	100.00
14	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	90.28	90	100.31
15	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	85.25	90	94.72
	Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100.00
17	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	100	100	92.00
18	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	Persen	40.21	46	87.41
19	Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada	Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang	<b>Persen</b>	<b>100</b>	100	100.00

No	Sasaran Strategis masyarakat	Indikator Kinerja terlaksana	Satuan	Realisasi Tahun 2025 (%)	Target Periode Akhir Renstra (2030) %	Capaian Periode Akhir Renstra (2026) %
20	Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	persen	91.68	92	99.65
21	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	persen	100	100	100
22	Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	persen	100	100	100
23	Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial	Persentase penanganann konflik sosial yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100

Sumber : Bakesbangpol Banjar



Gambar 3. 1 Grafik persentase realisasi kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dibanding target periode akhir (2026)

Berdasarkan grafik perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dan target akhir Renstra Tahun 2030, secara umum seluruh indikator kinerja strategis menunjukkan capaian yang relatif mendekati target yang

telah ditetapkan, meskipun masih terdapat gap yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pada indikator Indeks Demokrasi Indonesia, realisasi Tahun 2025 sebesar 80,82, mendekati target akhir Renstra sebesar 81. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, serta penguatan lembaga demokrasi di daerah telah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan melalui penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.

Selanjutnya, indikator Indeks Kinerja Ormas mencatat realisasi Tahun 2025 sebesar 74,14, masih berada di bawah target akhir Renstra sebesar 81. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan agar peran serta kontribusinya dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah dapat lebih optimal.

Sementara itu, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan realisasi Tahun 2025 sebesar 77,53, mendekati target akhir Renstra sebesar 80,50. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akuntabilitas kinerja perangkat daerah, namun tetap memerlukan penguatan perencanaan kinerja, pengukuran, serta evaluasi berkelanjutan agar target Renstra dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, grafik tersebut menggambarkan bahwa kinerja Bakesbangpol Kabupaten Banjar berada pada jalur yang positif menuju pencapaian target Renstra Tahun 2030. Ke depan, diperlukan strategi penguatan program, peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor untuk menutup gap capaian kinerja yang masih ada.

## **A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar Provinsi dan Nasional**

Untuk realisasi capaian kinerja sasaran strategis maupun sasaran program Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar tahun 2025 sangat disayangkan tidak bisa dibandingkan dengan capaian target provinsi atau nasional, sebab pada level

provinsi sasaran strategis maupun sasaran program yang dipakai oleh Badan Kesbangpol Provinsi berbeda dengan yang dipakai oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar, begitupula dengan level nasional juga tidak bisa dibandingkan sebab Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri memiliki sasaran strategis dan sasaran program yang jauh berbeda dengan yang dipakai pada Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar.

**Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar Provinsi dan Nasional**

No	SasaranStrategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah	indeks Demokrasi indonesia	Nilai indeks	80,82	81.91	79,81
2	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	Nilai indeks	74.14	72.27	80.34
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,53	83,01	n/a
4	Meningkatnya kepatuhan dan Kinerja Intern perangkat daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	85,57	n/a	n/a
5	terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan ,Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	n/a	n/a
6	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	n/a	n/a
7	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	persen	100	n/a	n/a
8	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	persen	100	n/a	n/a
9	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	persen	100	n/a	n/a
10	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan	persen	100	n/a	n/a

No	SasaranStrategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
	Daerah	Umum yang Berkualitas				
11	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	persen	100	n/a	n/a
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	n/a
13	Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di Bidang Ekosobud yang dikeluarkan sesuai standar	persen	100	n/a	n/a
14	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	90,28	n/a	n/a
15	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	persen	85.25	n/a	n/a
16	Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	Persen	100	n/a	n/a
17	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	100	n/a	n/a
18	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	Persen	91.68	100	n/a
19	Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat	Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang terlaksana	persen	n/a	n/a	n/a
20	Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	Persen	n/a	n/a	n/a
21	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	100	100	n/a
22	Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan	Persen	100	n/a	n/a

No	SasaranStrategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
		kerjasama intelijen				
23	Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial	Persentase penangan konflik sosial yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	n/a

Sumber : Bakesbangpol Banjar

Pada Tahun 2025, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar menunjukkan hasil yang sangat baik pada hampir seluruh sasaran strategis. Pada sasaran meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Banjar mencapai 80,82, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 79,81, meskipun masih sedikit di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 81,91. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Kabupaten Banjar telah berada di atas rata-rata nasional dan mencerminkan kondisi kehidupan demokrasi yang relatif stabil dan kondusif.

Pada sasaran meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan, Indeks Kinerja Ormas Kabupaten Banjar tercatat sebesar 74,14, lebih baik dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 72,27, namun masih berada di bawah capaian nasional sebesar 80,34. Capaian ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banjar telah berjalan cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan agar dapat menyamai standar nasional. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Nilai SAKIP Kesbangpol Kabupaten Banjar sebesar 77,53, masih lebih rendah dibandingkan capaian provinsi yang mencapai 83,01, yang mengindikasikan perlunya penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Dari sisi tata kelola internal, Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesbangpol mencapai 85,57, yang menunjukkan bahwa sistem administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta manajemen internal telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini juga tercermin dari capaian indikator penunjang lainnya, seperti persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi, laporan keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, jasa penunjang pelayanan umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana, yang seluruhnya

mencapai 100 persen, menandakan bahwa dukungan administratif dan operasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol telah berjalan optimal.

Pada bidang penguatan ideologi Pancasila dan ketahanan sosial budaya, capaian kinerja juga menunjukkan hasil yang sangat positif. Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan mencapai 100 persen, dengan tingkat pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan sebesar 90,28 persen, serta pemahaman masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sebesar 85,25 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial budaya telah terlaksana secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pemahaman masyarakat.

Dalam aspek kerukunan umat beragama dan penanganan konflik sosial, kinerja Kesbangpol Kabupaten Banjar juga menunjukkan hasil yang sangat optimal. Persentase rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik yang ditindaklanjuti mencapai 100 persen, sejalan dengan persentase konflik sosial yang berhasil diselesaikan dan ditindaklanjuti yang juga mencapai 100 persen, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem koordinasi, mediasi, dan fasilitasi penyelesaian konflik di Kabupaten Banjar telah berjalan efektif dan responsif.

Selain itu, dalam aspek ketertiban organisasi kemasyarakatan, persentase ormas yang aktif melaporkan keberadaannya mencapai 91,68 persen, meskipun masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banjar telah tertib administrasi, namun masih diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan lanjutan agar seluruh ormas dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara penuh. Secara keseluruhan, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, baik pada aspek substantif maupun tata kelola, serta menjadi landasan yang kuat dalam mendukung stabilitas sosial, demokrasi, dan ketahanan nasional di daerah.

#### **A.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan atau kegagalan suatu sasaran kinerja dapat dilihat dari keberhasilan indikator kinerja yang tercapai dari target kinerja. Kegagalan suatu sasaran kinerja tentunya memerlukan alternatif solusi dalam pencapaiannya.

Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah atau akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut :

**1. Meningkatkan kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi**

Faktor Pendorong:

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia yang melampaui target didukung oleh kondisi sosial yang relatif kondusif serta terjaminnya kebebasan sipil dalam berekspresi, berkumpul, dan berpendapat. Pelaksanaan pendidikan politik dan fasilitasi demokrasi juga berkontribusi positif terhadap capaian ini. Namun demikian, masih terdapat indikator dengan nilai relatif rendah, seperti pemenuhan hak-hak pekerja, kesetaraan gender, dan kapasitas lembaga legislatif.

Faktor Penghambat :

Masih terdapat keterbatasan partisipasi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam kegiatan politik dan demokrasi. Selain itu, kapasitas kelembagaan legislatif dan kualitas representasi politik belum sepenuhnya merata di semua wilayah.

Alternatif solusi:

Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga perwakilan serta meningkatkan program pendidikan politik yang lebih inklusif, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan.

**2. Meningkatkan kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan**

Faktor Pendorong :

Capaian Indeks Kinerja Ormas yang melampaui target menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan ormas telah berjalan efektif, khususnya pada dimensi partisipasi dan kerawanan. Ormas semakin berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, dimensi kelembagaan masih menjadi aspek yang perlu ditingkatkan.

Faktor Penghambat :

Sebagian ormas masih memiliki keterbatasan dalam tata kelola organisasi, administrasi, dan legalitas, serta belum seluruhnya aktif menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

Alternatif Solusi :

Melanjutkan pembinaan ormas dengan fokus pada penguatan kelembagaan, legalitas, dan tata kelola organisasi secara bertahap.

### **3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Faktor Pendorong:

Nilai SAKIP menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah diterapkan dengan cukup baik, terutama pada aspek perencanaan dan pelaporan kinerja. Dokumen perencanaan dan LKjIP telah disusun sesuai ketentuan. Walaupun kendala masih ditemukan pada aspek pengukuran kinerja dan evaluasi internal yang belum optimal.

Faktor Penghambat :

Masih terdapat keterbatasan pemahaman aparatur terhadap indikator kinerja berbasis outcome serta keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Alternatif solusi:

Meningkatkan konsistensi data kinerja serta memperkuat pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan kinerja tahun berikutnya.

### **4. Meningkatnya kepatuhan dan kinerja internal perangkat daerah**

Faktor Pendorong:

Capaian Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern yang melampaui target menunjukkan bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal telah berjalan dengan baik. Penilaian mandiri dilakukan sesuai norma dan prosedur.

Faktor Penghambat :

Belum seluruh unit kerja memiliki kualitas dokumentasi dan pengelolaan bukti kinerja yang seragam sehingga mempengaruhi konsistensi penilaian internal.

Alternatif solusi:

Mempertahankan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara rutin serta meningkatkan kualitas dokumentasi penilaian.

### **5. Terkoordinirnya penyusunan dokumen perangkat daerah**

Faktor Pendorong:

Koordinasi antar unit kerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja berjalan efektif. Seluruh dokumen dapat disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Faktor Penghambat :

Perubahan regulasi dan dinamika kebijakan nasional/daerah terkadang memerlukan penyesuaian dokumen yang cukup cepat dan mempengaruhi konsistensi penyusunan.

Alternatif solusi:

Mempertahankan pola koordinasi dan disiplin waktu dalam penyusunan dokumen perangkat daerah.

## **6. Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah**

Faktor Pendorong :

Pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan serta proses verifikasi dan penatausahaan keuangan telah berjalan tertib. Seluruh dokumen keuangan disusun sesuai aturan yang berlaku.

Faktor Penghambat:

Masih adanya dinamika perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem aplikasi pelaporan keuangan yang menuntut penyesuaian teknis dari aparatur. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengelola keuangan pada periode tertentu berpotensi menimbulkan beban kerja yang tinggi, terutama pada saat penyusunan dan verifikasi laporan keuangan, sehingga berisiko memperlambat proses penyelesaian administrasi apabila tidak dikelola dengan baik.

Alternatif solusi:

Melanjutkan peningkatan ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah.

## **7. Lancarnya administrasi kepegawaian perangkat daerah**

Faktor Pendorong:

Administrasi kepegawaian dikelola secara konsisten, meliputi pengelolaan data pegawai, absensi, SKP, dan layanan kepegawaian lainnya. Dukungan pemanfaatan aplikasi kepegawaian juga membantu kelancaran administrasi.

Faktor Penghambat :

Perubahan data kepegawaian yang cukup dinamis, seperti mutasi, promosi, pensiun, dan perubahan status kepegawaian, menuntut pembaruan data yang cepat dan akurat. Selain itu, masih terdapat keterbatasan pemahaman sebagian aparatur dalam pemanfaatan aplikasi kepegawaian secara optimal,

sehingga pada kondisi tertentu dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidaksesuaian data administrasi

Alternatif solusi:

Menjaga pembaruan data kepegawaian secara berkala dan melanjutkan peningkatan kompetensi aparatur.

#### **8. Lancarnya administrasi umum perangkat daerah**

Faktor Pendorong:

Penyelenggaraan administrasi umum, termasuk surat-menyurat dan kearsipan, berjalan sesuai standar operasional. Pengelolaan administrasi mendukung kelancaran pelayanan internal.

Faktor Penghambat :

Masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kearsipan, khususnya dalam hal penyimpanan dan digitalisasi dokumen, sehingga sebagian arsip masih dikelola secara manual. Kondisi ini berpotensi memperlambat proses penelusuran dan pemanfaatan dokumen administrasi apabila diperlukan dalam waktu cepat.

Alternatif solusi:

Mempertahankan kualitas administrasi umum dan meningkatkan ketertiban pengelolaan arsip.

#### **9. Tersedianya pengadaan barang milik daerah**

Faktor Pendorong:

Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana telah disusun sesuai prioritas dan kebutuhan perangkat daerah. Proses pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Faktor Penghambat :

Adanya perubahan kebutuhan operasional dan fluktuasi harga barang di pasar dapat mempengaruhi kesesuaian antara rencana pengadaan dengan kondisi riil. Selain itu, keterbatasan ketersediaan penyedia barang tertentu dan proses administrasi pengadaan yang harus mengikuti tahapan regulatif berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan.

Alternatif solusi:

Melakukan evaluasi kebutuhan barang secara periodik agar pengadaan tetap tepat guna dan efisien.

#### **10. Lancarnya jasa penunjang pelayanan umum**

Faktor Pendorong :

Pelaksanaan jasa penunjang pelayanan umum berjalan sesuai standar kualitas dan kebutuhan operasional kantor. Hal ini mendukung kelancaran aktivitas perangkat daerah.

Faktor Penghambat :

Ketergantungan pada pihak ketiga penyedia jasa penunjang, seperti tenaga non-ASN dan penyedia layanan pendukung lainnya, dapat mempengaruhi konsistensi kualitas layanan. Selain itu, keterbatasan anggaran serta perubahan kebutuhan operasional berpotensi menimbulkan keterlambatan atau penyesuaian dalam penyediaan jasa penunjang.

Alternatif solusi:

Mempertahankan kualitas layanan jasa penunjang secara berkelanjutan.

#### **11. Terpeliharanya sarana dan prasarana perangkat daerah**

Faktor Pendorong :

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara rutin dan terencana. Seluruh aset dapat berfungsi dengan baik dan layak pakai.

Faktor Penghambat :

Sebagian sarana dan prasarana memiliki usia pakai yang sudah cukup lama sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang lebih besar dan penanganan yang lebih intensif. Selain itu, keterbatasan anggaran pemeliharaan dapat membatasi ruang gerak dalam melakukan perbaikan atau penggantian aset secara cepat sesuai dengan kebutuhan.

Alternatif solusi:

Melanjutkan pemeliharaan berkala dan pengawasan kondisi aset daerah.

#### **12. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila**

Faktor Pendorong:

Kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila menjangkau seluruh elemen masyarakat sesuai target. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan relatif baik.

Faktor Penghambat :

Perbedaan tingkat pendidikan, latar belakang sosial, serta akses informasi menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila belum

merata, sehingga sebagian kelompok masih membutuhkan pendekatan dan metode sosialisasi yang lebih intensif.

Alternatif solusi:

Melanjutkan kegiatan sosialisasi dengan pendekatan yang sesuai karakteristik sasaran.

### **13. Meningkatkan kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya**

Faktor Pendorong:

Seluruh kebijakan disusun sesuai regulasi dan melalui koordinasi lintas sektor. Proses penyusunan kebijakan mengikuti tahapan yang ditetapkan.

Faktor Penghambat :

Dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang cepat berubah menuntut penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan, sehingga pada kondisi tertentu kebijakan yang telah disusun memerlukan pembaruan atau penyesuaian.

Alternatif solusi:

Mempertahankan kualitas perencanaan dan sinkronisasi kebijakan dengan kebutuhan daerah.

### **14. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila**

Faktor Pendorong:

Materi pembinaan relevan dan metode penyampaian efektif sehingga meningkatkan pemahaman peserta. Antusiasme masyarakat cukup tinggi.

Faktor Penghambat :

Keterbatasan waktu dan kesibukan masyarakat menyebabkan tidak seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan pembinaan secara optimal, sehingga tingkat pemahaman belum sepenuhnya merata.

Alternatif solusi:

Menjaga kualitas materi dan metode pembinaan agar capaian tetap optimal.

### **15. Meningkatkan pemahaman ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya**

Faktor Pendorong:

Materi pembinaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan pembinaan dilaksanakan secara terencana.

Faktor Penghambat :

Keberagaman kondisi sosial dan latar belakang peserta menyebabkan perbedaan tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih variatif.

Alternatif solusi:

Menyesuaikan materi pembinaan dengan isu aktual yang berkembang di masyarakat.

#### **16. Meningkatkan peran FKUB dalam pencegahan konflik**

Faktor Pendorong:

Koordinasi FKUB dengan pemerintah daerah berjalan efektif, dan rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini mendukung terjaganya kerukunan umat beragama.

Faktor Penghambat :

Masih adanya potensi perbedaan persepsi dan sensitivitas antar kelompok keagamaan yang memerlukan upaya komunikasi dan dialog yang berkelanjutan.

Alternatif solusi:

Mempertahankan sinergi dan komunikasi intensif antara FKUB dan perangkat daerah.

#### **17. Meningkatnya etika dan budaya politik**

Faktor Pendorong:

Pemanfaatan bantuan keuangan partai politik untuk kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sesuai ketentuan. Partai politik aktif melaksanakan pendidikan politik bagi kader.

Faktor Penghambat :

Belum seluruh kader dan simpatisan partai politik memiliki tingkat pemahaman dan komitmen yang sama terhadap etika dan praktik demokrasi yang sehat.

Alternatif solusi:

Mendorong kesinambungan dan peningkatan kualitas kegiatan pendidikan politik.

#### **18. Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan**

Faktor Pendorong:

Pembinaan dan monitoring terhadap ormas dilakukan secara rutin. Kesadaran ormas untuk melaporkan keberadaannya semakin meningkat.

Faktor Penghambat :

Sebagian ormas masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap kewajiban administratif dan regulasi pelaporan, sehingga belum seluruhnya tertib melaporkan keberadaan dan kegiatannya.

Alternatif solusi:

Meningkatkan sosialisasi kewajiban pelaporan dan pendataan ormas.

### **19. Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat**

Faktor Pendorong:

Seluruh kegiatan pembinaan dan pendidikan politik terlaksana sesuai perencanaan dan jadwal. Partisipasi masyarakat cukup baik.

Faktor Penghambat :

Keterbatasan jangkauan kegiatan dan partisipasi masyarakat di wilayah tertentu dapat mempengaruhi pemerataan manfaat pendidikan politik.

Alternatif solusi:

Menjaga konsistensi kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan politik.

### **20. Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan**

Faktor Pendorong:

Meningkatnya kesadaran ormas untuk memenuhi ketentuan legalitas sesuai peraturan perundang-undangan. Pendataan ormas berjalan baik.

Faktor Penghambat :

Sebagian ormas masih menghadapi kendala administratif dan kelengkapan persyaratan perizinan, baik karena keterbatasan sumber daya maupun pemahaman regulasi.

Alternatif solusi:

Memberikan pendampingan administratif bagi ormas yang belum memiliki legalitas lengkap.

### **21. Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan**

Faktor Pendorong:

Koordinasi lintas sektor dan respon cepat terhadap potensi konflik berjalan efektif. Seluruh potensi konflik dapat ditangani tepat waktu.

Faktor Penghambat :

Dinamika sosial dan potensi konflik yang dapat muncul secara tiba-tiba menuntut kesiapsiagaan tinggi dan koordinasi cepat antar pihak terkait.

Alternatif solusi:

Mempertahankan pola koordinasi dan kesiapsiagaan penanganan konflik.

## **22. Meningkatkan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen**

Faktor Pendorong:

Partisipasi masyarakat, aparat desa, dan FKDM dalam kegiatan kewaspadaan dini cukup tinggi. Kegiatan sosialisasi berjalan sesuai rencana.

Faktor Penghambat :

Belum seluruh masyarakat memahami pentingnya pelaporan dini terhadap potensi gangguan dan konflik, sehingga informasi awal terkadang belum sepenuhnya optimal.

Alternatif solusi:

Melanjutkan pembinaan dan sosialisasi kewaspadaan dini secara berkelanjutan.

## **23. Meningkatkan tindak lanjut penanganan potensi konflik sosial**

Faktor Pendorong:

Setiap potensi konflik ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi oleh Kesbangpol bersama stakeholder terkait. Hal ini mencegah eskalasi konflik.

Faktor Penghambat :

Luas wilayah pemantauan serta keterbatasan sumber daya dan personel di lapangan dapat mempengaruhi kecepatan dan intensitas tindak lanjut pada setiap potensi konflik yang muncul.

Alternatif solusi:

Menjaga kesiapsiagaan dan komunikasi lintas stakeholder dalam penanganan potensi konflik.

### **A.7 Analisis Atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Berdasarkan tabel capaian kinerja dan penyerapan anggaran Bakesbangpol Kabupaten Banjar Tahun 2025, secara umum penggunaan sumber daya menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini ditandai dengan tercapainya bahkan terlampauinya target kinerja pada hampir seluruh sasaran, meskipun realisasi penyerapan anggaran tidak mencapai 100 persen.

Pada sasaran strategis utama, seperti peningkatan kualitas kebebasan

sipil dan penguatan demokrasi, peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, capaian kinerja berada pada kisaran 99–103 persen, sementara penyerapan anggaran berkisar antara 90–94 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi antara 8–9 persen.

Efisiensi yang cukup tinggi juga terlihat pada sasaran yang bersifat substantif, khususnya pada kegiatan penguatan ideologi Pancasila, peningkatan pemahaman masyarakat, serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, di mana capaian kinerja mencapai lebih dari 100 persen, sementara penyerapan anggaran relatif lebih rendah, yaitu pada kisaran 74–88 persen. Tingkat efisiensi pada sasaran ini berada pada kisaran 25–31 persen, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang relatif minimal. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya partisipasi masyarakat serta efektivitas metode pelaksanaan kegiatan.

Pada sasaran yang bersifat administratif dan penunjang, seperti administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana, tingkat efisiensi relatif kecil, bahkan berada di bawah 2 persen pada beberapa indikator. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah direncanakan secara tepat sesuai kebutuhan riil, sehingga realisasi anggaran mendekati pagu yang ditetapkan tanpa mengurangi capaian kinerja.

Sementara itu, pada sasaran terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial, capaian kinerja mencapai 100 persen dengan penyerapan anggaran di atas 93 persen, serta tingkat efisiensi pada kisaran 6–7 persen. Hal ini mencerminkan bahwa penggunaan sumber daya pada sasaran tersebut telah dilaksanakan secara optimal dan proporsional, sejalan dengan karakter kegiatan yang membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025 telah mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, dengan pencapaian kinerja yang optimal dan penggunaan anggaran yang

terkendali. Capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan praktik pengelolaan sumber daya yang telah berjalan baik serta melakukan penyempurnaan pada perencanaan anggaran di tahun berikutnya agar semakin berorientasi pada hasil dan dampak.

**Tabel 3. 7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq$ 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah	indeks Demokrasi indonesia	100.8	91.67	9.13
2	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	103	94.04	8.96
3	Meningkatnya kepatuhan dan Kinerja Intern perangkat daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.84	90.35	10.49
4	terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan ,Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	97.06	2.94
5	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	88.58	11.42
6	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	98.53	1.47
7	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	98.68	1.32
8	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	99.26	0.74
9	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	100	86.32	13.68
10	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	100	99.65	0.35
11	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	87.59	12.41
12	Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di Bidang Ekosobud yang dikeluarkan sesuai standar	100	74.69	25.31
13	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan	113	87.59	25.41

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq$ 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
		karakter kebangsaan			
14	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	106.56	74.69	31.87
15	Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	100	74.69	25.31
16	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100	98.7	1.30
17	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	100.52	94.04	6.48
18	Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat	Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang terlaksana	100	98.7	1.30
19	Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	101	94.04	6.96
20	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100	93.09	6.91
21	Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	100	93.39	6.61
22	Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	100	93.39	6.61

Sumber : data diolah

Secara umum, pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang ditandai dengan hampir seluruh indikator kinerja pada masing-masing sasaran telah mencapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif lebih rendah dari capaian kinerjanya.

Sasaran meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di daerah yang diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia berhasil mencapai 100,8% dengan penyerapan anggaran sebesar 91,67%, sehingga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas demokrasi daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, sasaran meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan yang diukur

melalui Indeks Kinerja Ormas juga melampaui target dengan capaian 103%, yang mencerminkan semakin kuatnya peran ormas dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah.

Pada sasaran meningkatnya kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah, indikator Kinerja Intern (IKKI) mencapai 100,84%. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola, pengendalian internal, dan sistem akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol telah berjalan secara optimal, dengan tingkat efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Sasaran pendukung kinerja kelembagaan, yaitu terkoordinirnya penyusunan dokumen perangkat daerah, tersusunnya laporan keuangan, lancarnya administrasi kepegawaian dan administrasi umum, tersedianya pengadaan barang milik daerah, jasa penunjang pelayanan, serta terpeliharanya sarana dan prasarana, seluruhnya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan, penganggaran, administrasi, dan sarana prasarana telah mampu mendukung pencapaian sasaran strategis secara optimal dan berkelanjutan.

Pada sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, serta meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pembinaan ideologi dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, capaian kinerja berada pada kisaran 100% hingga 113%, yang menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan penguatan wawasan kebangsaan telah menjangkau dan memberi dampak yang lebih luas dari target yang direncanakan.

Selanjutnya, sasaran meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama, meningkatnya penanganan konflik sosial, serta meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial seluruhnya mencapai 100%, yang menegaskan bahwa sistem koordinasi, fasilitasi, dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Banjar telah berjalan secara efektif dan responsif.

Pada sasaran meningkatnya etika dan budaya politik, terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat, serta meningkatnya ketertiban dan legalitas organisasi kemasyarakatan, seluruh indikator mencapai 100% atau lebih, yang menunjukkan bahwa proses pembinaan politik dan penataan organisasi kemasyarakatan telah terlaksana sesuai target dan mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat.

Terakhir, sasaran meningkatnya kewaspadaan dini dan kerja sama

intelijen yang diukur melalui persentase pemahaman masyarakat juga mencapai 100%, menandakan bahwa upaya deteksi dini, koordinasi, dan kesiapsiagaan daerah terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat telah terlaksana dengan baik.

#### **A.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan target kinerja**

Program/Kegiatan berperan penting dalam mensupport pelaksanaan target kinerja karena mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja. Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan target kinerja sebagai berikut :

##### **1. Sasaran Strategis kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah.**

Keberhasilan sasaran ini ditunjang oleh pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pendidikan Politik, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Program dan kegiatan tersebut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan, serta menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif dan stabil.

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara aktif melakukan pengendalian, koordinasi, dan pengarahan kepada seluruh bidang dan unit kerja, antara lain melalui rapat pimpinan, monitoring pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi berkala atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran. Kepala Badan juga memberikan arahan strategis kepada pejabat struktural dan pelaksana agar setiap kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan fasilitasi berjalan sesuai sasaran dan mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Banjar Tahun 2025, diperoleh nilai 80,81, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,15, dengan tingkat capaian 100,8 persen dan berada pada kategori "Baik". Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Banjar telah berjalan secara efektif, khususnya pada aspek kebebasan sipil dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Pelaksanaan program tersebut turut menjamin terpenuhinya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat, serta mendukung penguatan etika dan budaya politik di daerah. Hal ini juga tidak terlepas dari peran pimpinan yang secara konsisten mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui pembinaan kepada aparatur, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan langsung terhadap kegiatan di lapangan.

Namun demikian, masih terdapat indikator yang memerlukan penguatan lanjutan, terutama pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, seperti penguatan peran lembaga perwakilan. Ke depan, diperlukan peningkatan sinergi dan koordinasi dengan lembaga legislatif, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya, yang akan terus difasilitasi dan dikendalikan oleh pimpinan Badan Kesbangpol, agar kualitas demokrasi daerah dapat semakin inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

## **2. Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan**

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini ditunjang oleh pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, pendataan, serta pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banjar. Program dan kegiatan tersebut mendorong meningkatnya peran serta ormas dalam mendukung stabilitas sosial, partisipasi masyarakat, serta pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara aktif melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian kepada seluruh bidang yang menangani urusan organisasi kemasyarakatan, melalui rapat teknis, pemberian arahan kebijakan, serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas. Kepala Badan juga memastikan agar seluruh kegiatan pendataan dan fasilitasi ormas dilaksanakan secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO) Kabupaten Banjar Tahun 2025, diperoleh nilai sebesar 74,17 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 72 persen, dengan tingkat capaian 103 persen dan berada pada kategori “Baik” atau “Emergent (Berkembang)”. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi kemasyarakatan telah menjalankan peran dan fungsinya secara cukup efektif, khususnya dalam

mendukung ketertiban dan partisipasi sosial.

Komposisi pembentuk IKO menunjukkan bahwa Dimensi Kerawanan menjadi penyumbang nilai tertinggi, diikuti oleh Dimensi Partisipasi, sementara Dimensi Kelembagaan masih menjadi aspek dengan nilai terendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun peran dan kontribusi ormas dalam kegiatan sosial kemasyarakatan cukup baik, masih diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, seperti tata kelola organisasi, administrasi, dan legalitas.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Kepala Badan memberikan arahan agar perangkat pelaksana lebih memfokuskan kegiatan pembinaan pada penguatan kelembagaan ormas, termasuk melalui pendampingan administrasi, fasilitasi legalitas, serta peningkatan kapasitas pengurus ormas. Kepala Badan juga mendorong peningkatan sinergi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan agar pembinaan ormas dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

Ke depan, diperlukan keberlanjutan program pembinaan yang lebih terarah pada penguatan kelembagaan ormas, peningkatan kapasitas pengurus, serta pendampingan administrasi secara sederhana dan berkelanjutan. Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat semakin berdaya, profesional, dan berkontribusi secara optimal dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan daerah.

### **3. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjang oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan tersebut berperan penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja perangkat daerah secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara aktif melakukan pengarahan, koordinasi, dan pengendalian kepada seluruh bidang dan unit kerja, terutama dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, penetapan indikator kinerja, serta pelaporan kinerja. Kepala Badan juga memimpin rapat-rapat evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa setiap unit kerja memahami target kinerja yang harus dicapai dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebesar 77,53 dengan predikat “BB” (Sangat Baik). Capaian ini mendekati target yang ditetapkan sebesar 78,25, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,07 persen, yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah diterapkan secara konsisten.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek perencanaan kinerja telah tersusun dengan baik melalui mekanisme cascading dan keterkaitan antarbidang, serta didukung oleh penyusunan dokumen perencanaan yang selaras. Pelaporan kinerja juga telah berjalan dengan baik, di mana LKJIP disusun tepat waktu dan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah. Capaian ini tidak terlepas dari peran pimpinan yang secara berkelanjutan memberikan pembinaan kepada pejabat struktural dan pelaksana terkait penyusunan indikator, pelaporan kinerja, serta pemenuhan eviden kinerja.

Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, khususnya terkait konsistensi data dan pemanfaatan hasil evaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Badan telah mengarahkan agar setiap bidang meningkatkan kualitas pengumpulan data, memperkuat validasi data, serta memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan.

#### **4. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Internal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Pencapaian sasaran kinerja ini ditunjang oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan, serta Administrasi Kepegawaian, yang secara langsung mendukung pemenuhan unsur kepatuhan, tata kelola, dan kinerja internal perangkat daerah. Kegiatan tersebut berperan dalam memperkuat tata kelola organisasi, manajemen risiko, serta penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan kualitas kinerja internal perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Badan Kesbangpol berperan sebagai koordinator administrasi dan pengendali internal, antara lain dengan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, serta perencanaan dan pelaporan kinerja. Sekretaris juga memastikan bahwa seluruh proses administrasi, mulai dari pengelolaan anggaran, penatausahaan keuangan, pengelolaan SDM, hingga penyusunan laporan kinerja dan dokumen pendukung, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesbangpol Tahun 2025, diperoleh nilai capaian sebesar 85,57 poin, melampaui target yang ditetapkan sebesar 84,86 poin, dengan tingkat capaian kinerja 100,83 persen dan predikat pelaksanaan “Sangat Tinggi”. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan komponen kepatuhan dan kinerja pelayanan publik telah berjalan secara efektif.

Pemenuhan unsur kepatuhan dan kinerja dalam penilaian IKKI didukung oleh penilaian mandiri yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan, yang mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. Sekretaris juga mengoordinasikan pengumpulan dan verifikasi dokumen pendukung dari seluruh unit kerja, serta memfasilitasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian internal.

#### **5. Sasaran Kinerja Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah**

Pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan RKA dan DPA, penyusunan perubahan dokumen anggaran, serta koordinasi dan penyusunan laporan capaian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Melalui sub kegiatan tersebut, seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, Kasubbag Perencanaan berperan sebagai koordinator teknis, antara lain dengan:

- Mengkoordinasikan penyusunan dan penginputan Renja dan Renja Perubahan melalui aplikasi SIPD;
- Memfasilitasi desk pembahasan dan finalisasi Renja bersama Bapperida/Bappedalitbang;

- Mengkoordinasikan pengumpulan usulan kegiatan dari seluruh bidang;
- Mengendalikan proses penyusunan dan penginputan RKA dan RKA Perubahan sesuai pagu indikatif;
- Melakukan perbaikan RKA berdasarkan reuiu APIP dan hasil pembahasan DPRD;
- Mengkoordinasikan penyusunan dan pengesahan DPA, DPA Pergeseran, dan DPA Perubahan; serta
- Mengendalikan penyusunan, pengarsipan, dan distribusi seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran.

Selain itu, pada aspek evaluasi kinerja, Kasubbag Perencanaan secara aktif mengkoordinasikan pengumpulan data realisasi kinerja dari seluruh bidang, menyusun laporan evaluasi bulanan dan triwulanan, memfasilitasi rapat evaluasi internal, serta melakukan penginputan dan asistensi pelaporan kinerja melalui aplikasi Simondalev. Kasubbag Perencanaan juga mengkoordinasikan penyusunan LKJIP Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah.

Dengan koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kasubbag Perencanaan, seluruh dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dapat disusun secara tepat waktu, sesuai ketentuan, dan mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

## **6. Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan akhir tahun. Melalui sub kegiatan tersebut, seluruh proses pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai ketentuan. Dalam pelaksanaannya, Kasubbag Keuangan dan Aset berperan sebagai koordinator teknis pengelolaan keuangan, antara lain dengan:

- Mengendalikan proses penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan ASN serta melakukan penginputan pada aplikasi SIM Gaji, Payroll One Step, dan SIPD Penatausahaan;
- Mengkoordinasikan penyampaian dokumen pembayaran gaji dan TPP ASN

ke BPKPAD untuk proses pencairan;

- Memverifikasi dan mengendalikan pembayaran honorarium bendahara pengeluaran, PPTK, PPK-SKPD, pengurus barang, dan pejabat pengadaan;
- Mengendalikan penatausahaan SPJ (LS, GU, dan TU), termasuk penginputan bukti transaksi dan pajak pada aplikasi SIPD RI dan SIPD Langkar;
- Memfasilitasi pembayaran SPJ melalui aplikasi IBB Bank Kalsel; serta
- Mengkoordinasikan rekonsiliasi pajak dan pelaporan keuangan bulanan.

Selain itu, Kasubbag Keuangan dan Aset mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan akhir tahun, berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), termasuk pencetakan dokumen laporan keuangan unaudited dan audited Tahun Anggaran 2024. Untuk Tahun Anggaran 2025, Kasubbag Keuangan dan Aset telah mengendalikan proses penginputan saldo awal dan jurnal balik sebagai bagian dari persiapan penyusunan laporan keuangan tahun berjalan.

Dengan koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kasubbag Keuangan dan Aset, proses penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dapat dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung pencapaian sasaran tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan berkualitas.

## **7. Lancarnya administrasi kepegawaian perangkat daerah**

Sasaran strategis “Lancarnya administrasi kepegawaian perangkat daerah” diukur melalui indikator Persentase administrasi kepegawaian yang berkualitas. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini antara lain didukung oleh terpenuhinya target 6 orang pegawai yang mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain pelaksanaan bimbingan teknis, kualitas administrasi kepegawaian juga tercermin dari tertibnya pengelolaan absensi dan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan, penyusunan dan pembaruan data kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG, pengusulan kenaikan pangkat dan penyesuaian jabatan fungsional, pengelolaan cuti pegawai, pemrosesan penilaian kinerja pegawai (SKP dan e-Kinerja), serta pengelolaan arsip kepegawaian dan surat-menyurat kedinasan. Dalam pelaksanaannya, Kasubbag Umum dan Kepegawaian berperan

sebagai koordinator teknis administrasi kepegawaian, antara lain dengan:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan keikutsertaan pegawai dalam bimbingan teknis;
- Mengendalikan penginputan dan pemutakhiran data pegawai pada aplikasi SIMPEG dan sistem kepegawaian lainnya;
- Memverifikasi dan memproses usulan kenaikan pangkat, penyesuaian jabatan fungsional, dan mutasi pegawai;
- Mengelola administrasi cuti, izin, dan surat tugas pegawai;
- Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaporan SKP serta e-Kinerja; serta
- Mengelola arsip kepegawaian dan korespondensi kedinasan secara tertib dan terdokumentasi.

Adapun sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, yang berfungsi untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman pegawai terhadap regulasi kepegawaian dan tata kelola pemerintahan. Dengan koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, seluruh proses administrasi kepegawaian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dapat berjalan secara lancar, tertib, dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung peningkatan kualitas kinerja aparatur perangkat daerah.

#### **8. Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas. Sasaran ini didukung melalui sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, fasilitas kunjungan tamu, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Dalam pelaksanaannya, Kasubbag Umum dan Kepegawaian berperan sebagai koordinator operasional administrasi umum, dengan mengendalikan penyusunan KAK, pengajuan permohonan kepada PPK dan PP, proses pengadaan melalui e-katalog, negosiasi dengan penyedia, penerbitan surat pesanan, penerimaan barang/jasa, penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST), serta proses pembayaran. Selain itu, Kasubbag juga memfasilitasi pelayanan tamu, mengkoordinasikan penyediaan konsumsi dan logistik rapat, serta mengatur perjalanan dinas dan penyusunan laporan perjalanan dinas.

Dengan pengendalian tersebut, seluruh kebutuhan administrasi umum dapat terpenuhi secara tepat waktu, tertib, dan sesuai standar kualitas.

#### **9. Sasaran Kinerja Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas, yang diukur dari terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Pada anggaran murni dilakukan pengadaan locker besi, CCTV, kursi kerja dan tamu, serta AC, sedangkan pada anggaran perubahan dilakukan pengadaan tambahan berupa dispenser, lemari arsip, lemari display, dan televisi LED.

Dalam pelaksanaannya, Kasubbag Umum dan Kepegawaian mengoordinasikan seluruh tahapan pengadaan, mulai dari penyusunan KAK dan spesifikasi teknis, pengajuan kepada PPK dan PP, pelaksanaan pengadaan melalui e-katalog, negosiasi harga, penerbitan surat pesanan, hingga penerimaan barang, penyusunan BAST, dan proses pembayaran. Peran ini memastikan seluruh pengadaan berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan memenuhi standar kualitas.

#### **10. Sasaran Kinerja Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat daerah**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas, yang diukur dari tersusunnya laporan jasa penunjang sesuai standar kualitas. Sub kegiatan pendukungnya adalah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, yang antara lain meliputi pengelolaan tenaga Non ASN.

Dalam hal ini, Kasubbag Umum dan Kepegawaian berperan dalam mengoordinasikan administrasi tenaga Non ASN, mulai dari pendataan, pengusulan, hingga pengendalian pembayaran honorarium sesuai ketentuan. Kasubbag juga memastikan kelengkapan administrasi dan laporan jasa penunjang tersusun tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan.

#### **11. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas, yaitu persentase sarana dan prasarana (BMD) yang tersedia, berfungsi dengan baik, dan layak pakai. Sub kegiatan pendukung

meliputi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Kasubbag Umum dan Kepegawaian mengendalikan kegiatan pemeliharaan, mulai dari penyusunan telaahan staf dan KAK, pengusulan dan pencairan anggaran, hingga pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan bangunan yang rusak. Kasubbag juga mengoordinasikan pendataan kondisi BMD dan memastikan sarana prasarana tetap dalam kondisi layak pakai dan mendukung kelancaran operasional kantor.

## **12. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan target sebesar 100 persen, yaitu mencakup 4 (empat) elemen masyarakat dari total 4 elemen sasaran, meliputi Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/Kecamatan, Anggota Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat. Pada Tahun 2025, capaian indikator ini telah mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh elemen sasaran telah terjangkau oleh kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

Pencapaian sasaran kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, khususnya melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama berperan aktif dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penguatan ideologi Pancasila, antara lain dengan menyusun rencana teknis kegiatan, menentukan sasaran dan materi pembinaan, mengoordinasikan narasumber, serta memantau langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kepala Bidang juga memfasilitasi sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, serta unsur masyarakat agar kegiatan pembinaan dapat menjangkau seluruh elemen sasaran secara optimal.

Adapun sub-kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ini meliputi

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, serta Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. Dalam hal ini, Kepala Bidang mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, mengendalikan pelaporan kegiatan, serta melakukan pembinaan kepada petugas dan pelaksana kegiatan Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda.

Rangkaian sub-kegiatan tersebut berperan dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan semangat kebangsaan, serta membentuk karakter generasi muda dan masyarakat secara luas, sehingga sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dapat tercapai secara optimal.

**13. Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat**

Indikator kinerja pada sasaran ini diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar penyusunan kebijakan terhadap jumlah keseluruhan kebijakan yang dihasilkan pada periode berjalan. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100 persen dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen.

Capaian tersebut tercermin dari ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kebijakan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui tahapan perencanaan yang sistematis.

Dalam proses penyusunan kebijakan tersebut, Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama berperan aktif dalam mengoordinasikan pengumpulan data dan masukan dari pemangku kepentingan, memfasilitasi rapat pembahasan lintas sektor, serta menyusun telaahan teknis dan naskah substansi kebijakan.

Pencapaian sasaran kinerja ini juga didukung oleh pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang mendorong tersusunnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Kepala Bidang mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi dialog dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta monitoring terhadap isu-isu strategis di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan agama sebagai bahan perumusan kebijakan.

Dengan dukungan peran aktif Kepala Bidang, kualitas kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat secara berkelanjutan, sehingga sasaran meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat dapat dicapai secara optimal.

#### **14. Sasaran Kinerja Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 80 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 90,28 persen, sehingga persentase capaian terhadap target mencapai 113 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan berjalan sangat efektif dan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat melebihi target yang ditetapkan.

Pencapaian sasaran kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan selama periode Januari sampai Desember 2025. Sepanjang tahun tersebut telah dilaksanakan 5 (lima) kegiatan pembinaan dengan sasaran pelajar SMP dan SMA, masyarakat, aparatur desa, anggota organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Banjar, dengan jumlah peserta rata-rata 70 orang per kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, Kasubbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berperan aktif dalam menyiapkan dan mengendalikan seluruh proses teknis kegiatan, mulai dari penyusunan materi pembinaan, penentuan sasaran dan jadwal kegiatan, koordinasi dengan narasumber dan pihak sekolah/desa/ormas, hingga

pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kasubbid juga mengoordinasikan pengumpulan data peserta, pelaksanaan pre-test dan post-test, serta pengolahan hasil penilaian untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat.

Hasil ini menegaskan bahwa metode pembinaan, kualitas materi, serta peran narasumber yang dikoordinasikan oleh Kasubbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan telah berjalan optimal dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, sehingga sasaran kinerja dapat tercapai secara sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

#### **15. Sasaran Kinerja Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Rekomendasi FKUB dalam Pencegahan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang Ditindaklanjuti. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100 persen dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi FKUB telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.

Pencapaian sasaran kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama.

Dalam pelaksanaannya, Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama berperan sebagai koordinator teknis fasilitasi FKUB dan kerukunan umat beragama, dengan melakukan penyusunan rencana kegiatan, penentuan lokasi dan sasaran, koordinasi dengan FKUB, tokoh agama, pemerintah kecamatan dan desa, serta monitoring langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kasubbid juga mengoordinasikan pengumpulan data lapangan, penyusunan notulensi, serta dokumentasi kegiatan sebagai bahan pendukung rekomendasi FKUB.

Adapun aktivitas yang dilaksanakan pada Tahun 2025 meliputi:

- Moderasi Kerukunan Umat Beragama di SMP Mitra Kasih (21 Mei 2025) dengan 100 peserta;

- Moderasi Kerukunan Umat Beragama di SMPN 1 Gambut (22 Mei 2025) dengan 100 peserta;
- Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama (27 Mei 2025) dengan 70 peserta dari FKUB Kabupaten, FKUB Kecamatan, dan penyuluh agama;
- Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Karang Intan (16 Juni 2025) dengan 70 peserta;
- Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Kertak Hanyar (18 Juni 2025) dengan 70 peserta;
- Kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (24 Juli 2025) dengan 60 peserta;
- Moderasi Kerukunan Umat Beragama di SMPN 3 Martapura (10 September 2025) dengan 100 peserta.

Selain kegiatan tersebut, Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama juga memfasilitasi kegiatan FKUB Kabupaten Banjar dalam pengumpulan data lapangan dan rapat pembahasan rencana pendirian tempat ibadah di Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura pada 12 Juni 2025, dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Kegiatan ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi FKUB sesuai ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

Melalui koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, seluruh kegiatan fasilitasi kerukunan umat beragama dapat dilaksanakan secara terencana, terdokumentasi, dan tepat sasaran, sehingga FKUB mampu berperan aktif dalam mencegah potensi konflik serta menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan beragama di Kabupaten Banjar.

#### **16. Sasaran Kinerja Meningkatnya etika dan budaya politik**

Pencapaian sasaran kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan berperan sebagai pengendali dan koordinator pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik, dengan mengoordinasikan pendataan partai politik penerima bantuan keuangan, mengendalikan proses verifikasi rencana dan laporan kegiatan pendidikan politik, serta memfasilitasi komunikasi dan pembinaan kepada partai politik agar pelaksanaan pendidikan politik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Bidang juga memastikan kelengkapan dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban sebagai dasar penilaian capaian indikator kinerja.

Melalui program dan kegiatan tersebut, partai politik penerima bantuan keuangan difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang berfokus pada penguatan etika politik, pengembangan budaya politik yang demokratis, peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, serta penguatan komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan juga melakukan pemantauan situasi politik daerah, pengumpulan informasi lapangan, serta koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kondisi politik tetap kondusif selama pelaksanaan kegiatan.

Dengan terlaksananya seluruh kegiatan pendidikan politik oleh partai politik penerima bantuan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, sasaran kinerja meningkatnya etika dan budaya politik di Kabupaten Banjar dapat tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dikendalikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan telah berkontribusi nyata dalam membangun budaya politik yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

#### **17. Meningkatkan ketertiban organisasi kemasyarakatan**

Pencapaian sasaran kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Program dan kegiatan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang Tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berperan sebagai pengendali dan koordinator pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ormas, antara lain dengan mengoordinasikan

pendataan dan verifikasi keberadaan ormas, memfasilitasi penyampaian laporan keberadaan, serta memberikan pembinaan administratif kepada pengurus ormas. Kepala Bidang juga mengendalikan penyusunan materi sosialisasi, penjadwalan kegiatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan.

Selain itu, Kepala Bidang juga melakukan pembinaan rutin dan komunikasi aktif dengan pengurus organisasi kemasyarakatan, termasuk pendampingan dalam pemenuhan persyaratan administratif, fasilitasi legalitas dan pelaporan, serta verifikasi data ormas sebagai dasar penghitungan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO).

Melalui koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan semakin terdorong untuk memahami kewajiban administrasi, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta berperan aktif secara tertib dan konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan telah berjalan efektif dalam mendukung tercapainya sasaran meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banjar.

#### **18. Sasaran Kinerja Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat.**

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang terlaksana, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kegiatan yang terlaksana dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100 persen dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pembinaan dan pendidikan politik telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pencapaian sasaran kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, yang dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang Tahun 2025 dengan sasaran partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum. Kegiatan pembinaan dan pendidikan politik difokuskan pada peningkatan pemahaman hak dan kewajiban politik warga negara, penguatan demokrasi, serta penumbuhan budaya politik yang beretika dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, Kasubbid Politik Dalam Negeri berperan sebagai koordinator teknis pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, antara lain dengan menyusun rencana kegiatan, menetapkan sasaran dan lokasi, mengoordinasikan narasumber, serta memantau langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kasubbid juga mengoordinasikan pengumpulan data peserta, dokumentasi kegiatan, serta penyusunan laporan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja. Adapun rangkaian kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 meliputi:

- Sosialisasi LPJ Bantuan Keuangan Partai Politik pada 6 Mei 2025 dan 22 Oktober 2025;
- Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Organisasi Kemasyarakatan pada 20 Mei, 10 Juni, dan 24 Juni 2025;
- Forum Diskusi Politik pada 23 Juli dan 6 Agustus 2025;
- Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Partai Politik pada 10–11 September 2025;
- Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat pada 17–18 September, 6 Oktober, dan 15 Oktober 2025; serta
- Sosialisasi Pendidikan Politik di Desa Paau, Kecamatan Aranio pada 6 November 2025.

Selain kegiatan pembinaan dan pendidikan politik tersebut, Kasubbid Politik Dalam Negeri juga mengoordinasikan proses penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik kepada 11 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Banjar, mulai dari verifikasi kelengkapan administrasi, fasilitasi pencairan, hingga pengawasan penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan. Kegiatan ini memastikan bahwa bantuan keuangan dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan politik masyarakat dan penguatan kelembagaan partai politik secara akuntabel.

Dengan pengendalian dan koordinasi yang dilakukan oleh Kasubbid Politik Dalam Negeri, seluruh kegiatan pembinaan dan pendidikan politik dapat terlaksana sesuai rencana, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan, sehingga sasaran terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat dapat dicapai secara optimal.

#### **19. Sasaran Kinerja Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan**

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan didukung oleh pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, khususnya melalui Kegiatan Perumusan

Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Program dan kegiatan tersebut berperan dalam mendorong organisasi masyarakat untuk memahami pentingnya legalitas organisasi serta memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan organisasi masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, Kasubbid Organisasi Masyarakat berperan sebagai koordinator teknis fasilitasi legalitas ormas, dengan melakukan pendataan dan verifikasi status hukum ormas, pendampingan proses pendaftaran dan pembaruan data ormas pada sistem Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri, serta pembinaan administratif kepada pengurus ormas. Kasubbid juga mengoordinasikan pengumpulan dokumen persyaratan, memfasilitasi komunikasi antara ormas dan instansi terkait, serta memantau progres penyelesaian legalitas ormas.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 meliputi:

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Organisasi Masyarakat (Sosper) pada 13 Februari 2025 di Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur (60 peserta);
- Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Masyarakat pada 16 April 2025 di Hotel Rodhita Banjarbaru (50 peserta);
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Organisasi Masyarakat (Sosper) pada 26 April 2025 di Aula Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar (60 peserta);
- Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Masyarakat tentang Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat (IKO) pada 14 Mei 2025 di Hotel Rodhita Banjarbaru (50 peserta);
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Organisasi Masyarakat (Sosper) pada 4 Juni 2025 di Desa Bi'ih, Kecamatan Karang Intan (60 peserta);
- Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Masyarakat tentang Proses Hibah bagi Ormas dan Penghitungan IKO pada 12 Juni 2025 di Grand Qin Hotel Banjarbaru (50 peserta);
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Organisasi Masyarakat (Sosper) pada 7 Agustus 2025 di Lesehan Mega Martapura (60 peserta);

- Jambore Organisasi Kemasyarakatan pada 13 Agustus 2025 di Brazze Waterpark Banjarbaru (65 peserta).

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, organisasi kemasyarakatan semakin memahami kewajiban administrasi dan prosedur legalisasi, sehingga tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan legalitas terus meningkat. Hal ini tercermin dari capaian indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Memiliki Izin (Legalitas) yang melampaui target pada Tahun 2025. Dengan demikian, pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan telah berjalan efektif dalam mendukung tercapainya sasaran meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banjar.

## **20. Sasaran Kinerja Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan**

Pencapaian sasaran kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Program dan kegiatan tersebut berperan dalam memperkuat sistem deteksi dini, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mempercepat respons pemerintah daerah terhadap potensi konflik sosial di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berperan sebagai pengendali dan koordinator teknis penanganan konflik, antara lain dengan melakukan pemetaan wilayah rawan konflik, pengumpulan dan analisis informasi kewaspadaan dini, pengoordinasian rapat-rapat koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi dialog dan mediasi antar pihak yang berpotensi berkonflik. Kepala Bidang juga memimpin penyusunan telaahan dan rekomendasi penanganan konflik sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah.

Penanganan konflik sosial dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan responsif, yang mencakup pemetaan potensi konflik, rapat koordinasi dan konsolidasi, dialog dan mediasi, serta pelibatan unsur Forkopimda, FKDM, FKUB, perangkat daerah terkait, aparat kecamatan dan desa, serta tokoh masyarakat. Dengan pendekatan ini, potensi konflik dapat dikelola sejak dini dan diselesaikan melalui musyawarah sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Dengan pengendalian dan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, penanganan konflik sosial di Kabupaten Banjar dapat dilaksanakan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa sasaran kinerja meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan dapat tercapai secara optimal, sekaligus menjaga stabilitas sosial, ketenteraman masyarakat, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

## **21. Sasaran Kinerja Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen**

Pencapaian sasaran kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, khususnya melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Program dan kegiatan ini berperan penting dalam memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen berperan sebagai koordinator teknis pelaksanaan kewaspadaan dini, antara lain dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan, menghimpun dan menganalisis informasi dari FKDM dan jaringan intelijen daerah, serta mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Kasubbid juga memfasilitasi koordinasi dengan Forkopimda, unsur intelijen, aparat kecamatan dan desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pertukaran data dan informasi kewaspadaan.

Pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi, antara lain terkait penangkalan radikalisme dan penyebaran hoaks, pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing, serta pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Kabupaten Banjar. Setiap kegiatan diikuti oleh rata-rata 60 peserta, sehingga seluruh target peserta dapat terpenuhi sesuai dengan rencana.

Melalui pengendalian dan koordinasi yang dilakukan oleh Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, informasi potensi kerawanan sosial dapat dihimpun, dianalisis, dan ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat serta terjalinnya kerja sama intelijen yang efektif, sasaran kinerja meningkatnya kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen di Kabupaten Banjar dapat tercapai secara optimal dan

berkelanjutan.

## **22. Sasaran Kinerja Meningkatnya tindak lanjut penanganan potensi konflik sosial**

Pencapaian sasaran kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Program dan kegiatan tersebut berperan dalam memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kecepatan respons terhadap potensi konflik sosial di daerah.

Dalam pelaksanaannya, Kasubbid Penanganan Konflik berperan sebagai koordinator teknis tindak lanjut potensi konflik, antara lain dengan melakukan pemantauan lapangan, pengumpulan dan analisis informasi kerawanan, penyusunan telaahan dan rekomendasi penanganan, serta fasilitasi rapat koordinasi dan konsolidasi lintas sektor. Kasubbid juga mengoordinasikan pelaksanaan dialog dan mediasi antar pihak yang berpotensi berkonflik, serta memantau tindak lanjut rekomendasi yang telah disepakati.

Tindak lanjut penanganan potensi konflik sosial dilaksanakan melalui langkah-langkah konkret berupa pemantauan lapangan, rapat koordinasi dan konsolidasi, penyampaian rekomendasi kepada pihak terkait, serta fasilitasi dialog dan mediasi, dengan melibatkan unsur Forkopimda, FKDM, FKUB, perangkat daerah terkait, aparat kecamatan dan desa, serta tokoh masyarakat. Pendekatan ini memastikan penanganan dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan pengendalian dan koordinasi yang dilakukan oleh Kasubbid Penanganan Konflik, tindak lanjut potensi konflik sosial di Kabupaten Banjar dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan responsif. Hal ini memastikan bahwa sasaran kinerja meningkatnya tindak lanjut penanganan potensi konflik sosial dapat tercapai secara optimal, sekaligus mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas serta ketenteraman masyarakat di Kabupaten Banjar.

### **A.9 Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Banjar atas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 77,53 atau predikat Sangat Baik (BB). Maka direkomendasikan kepada Kepala Badan

Kesbangpol Kabupaten Banjar hal- hal sebagai berikut :

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2. Melakukan pengumpulan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan indikator dan target pada Rencana Aksi dan SIMONDALEV.
3. Menyusun rencana tindak lanjut terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai.
4. Pimpinan dan seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam melakukan pengukuran kinerja.
5. Melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan.
6. Memanfaatkan laporan kinerja untuk digunakan dalam penyesuaian perencanaan tahun berikutnya.
7. Menyusun rencana tindak lanjut perbaikan perencanaan kinerja berdasarkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja tahunan (LKJIP).
8. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melibatkan seluruh anggota Tim Evaluasi Internal dan dilakukan secara mendalam, berjenjang, dan berkelanjutan.
9. Melakukan dialog kinerja dengan seluruh pengampu sasaran kinerja, mulai dari tahap perencanaan, pengukuran hingga penyusunan laporan kinerja serta dalam proses evaluasi internal.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi dari inspektorat, Bakesbangpol Kabupaten Banjar akan melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi SAKIP secara berkala kepada seluruh pegawai melalui rapat internal, pembinaan pegawai, dan media informasi internal guna meningkatkan pemahaman, kepedulian, serta komitmen dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan.
2. Meningkatkan kualitas pengumpulan dan pengelolaan data kinerja dengan memastikan seluruh indikator kinerja memiliki data dukung yang relevan, akurat, dan terdokumentasi sesuai indikator dan target pada Rencana Aksi serta aplikasi SIMONDALEV.
3. Menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut terhadap indikator

kinerja yang belum tercapai melalui analisis penyebab ketidaktercapaian serta penetapan langkah perbaikan yang terukur dan realistis.

4. Meningkatkan peran aktif pimpinan dan seluruh pegawai dalam proses pengukuran kinerja melalui penguatan koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta pengawasan berkala terhadap pelaksanaan pengukuran kinerja.
5. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja secara konsisten berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan target kinerja.
6. Memanfaatkan hasil laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya, termasuk dalam penajaman sasaran, indikator, dan target kinerja.
7. Menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan perencanaan kinerja berdasarkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja tahunan (LKjIP) agar perencanaan lebih terukur dan selaras dengan tujuan organisasi.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara mendalam, berjenjang, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota Tim Evaluasi Internal.
9. Melaksanakan dialog kinerja secara berkala dengan seluruh pengampu sasaran kinerja mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, hingga penyusunan laporan kinerja sebagai bagian dari proses evaluasi internal.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

### **B.1 Realisasi Jenis Belanja**

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar mengelola anggaran sebesar Rp. 13.297.364.645,00,-, untuk membiayai pelaksanaan, 6 (Enam) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) sub kegiatan, dengan pembagian alokasi Rp. 13.297.364.645,- untuk Belanja Operasi yang terdiri atas Rp. 12.656.324.645,- untuk Belanja Pegawai, Rp. 4.136.000.000,- Belanja Barang Dan Jasa serta Rp. 6.668.334.645,- untuk Belanja Hibah Rp. 1.851.990.000,- adapun alokasi untuk Belanja Modal adalah sebesar Rp. 641.040.000,-. Untuk Realisasi jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut.

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Jenis Belanja**

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
1	Belanja Operasi	12.656.324.645	64,477,495,064	98.06
	a. Belanja Pegawai	4.136.000.000	3.649.089.519	86,22
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.668.334.645	5.986.317.305	89.77
	c. Belanja Hibah	1.851.990.000	1.851.990.000	100
2	Belanja Modal	641.040.000	637.360.850	99.42

## **B.2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Banjar Tahun 2025 terdiri dari 6 program, 12 kegiatan, dan 41 sub kegiatan. Program terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program yang ke-6 adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Realisasi anggaran Bakesbangpol Kabupaten Banjar tahun 2025 berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.783.994.445,00</b>	<b>5.225.737.605,00</b>	<b>90,35</b>
1.1	<b>Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>33.086.900,00</b>	<b>32.114.650,00</b>	<b>97.06</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.421.800,00	5.376.800,00	99,17
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.539.200,00	3.519.200,00	99,43
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.616.800,00	1.208.750,00	74,76
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.523.800,00	1.024.800,00	67,25

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.846.600,00	2.846.600,00	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.064.800,00	6.064.800,00	100
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.468.800,00	3.468.600,00	99,99
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	8.605.100,00	8.605.100,00	100,00
1.2	<b>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.314.199.800,00</b>	<b>3.821.412.519,00</b>	<b>88,58</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.129.000.000,00	3.644.189.519,00	88,26
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.145.000,00	173.510.000,00	95,79
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.647.600,00	3.313.000,00	90,83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	407.200,00	400.000,00	98,23
1.3	<b>Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>47.296.605,00</b>	<b>98,53</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000,00	47.296.605,00	98,53
1.4	<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>398.363.745,00</b>	<b>393.100.796,00</b>	<b>98,68</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.994.000,00	7.713.000,00	96,48
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.501.000,00	19.137.000,00	98,13
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.091.000,00	20.536.100,00	92,96
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.556.800,00	11.204.500,00	96,95
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.116.000,00	8.035.000,00	99,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.104.945,00	326.475.196,00	99,20
1.5	<b>Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>286.502.000,00</b>	<b>284.374.100,00</b>	<b>99,26</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	286.502.000,00	284.374.100,00	99,26
1.6	<b>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>404.538.000,00</b>	<b>349.178.000,00</b>	<b>86,32</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.538.000,00	349.178.000,00	86,32
1.7	<b>Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>299.304.000,00</b>	<b>298.260.935,00</b>	<b>99,65</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.750.000,00	42.674.896,00	99,82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.960.000,00	203.906.039,00	99,97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.184.000,00	29.920.000,00	99,13
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	22.410.000,00	21.760.000,00	97,10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Bangunan Lainnya			
2	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1.691.975.000,00</b>	<b>1.482.048.487,00</b>	<b>87,59</b>
2.1	<b>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1.691.975.000,00</b>	<b>1.482.048.487,00</b>	<b>87,59</b>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	227.832.000,00	198.532.250,00	87,14
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.902.000,00	2.750.000,00	56,10
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	115.368.000,00	71.212.500,00	61,73
	Pembentukan Paskibraka	1.175.326.000,00	1.095.625.837,00	93,41
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	15.411.000,00	9.349.000,00	60,66
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	37.560.000,00	37.090.000,00	98,75
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	115.576.000,00	65.208.900,00	56,42
3	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>2.433.511.900,00</b>	<b>2.401.822.900,00</b>	<b>98,70</b>
3.1	<b>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>2.433.511.900,00</b>	<b>2.401.822.900,00</b>	<b>98,70</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.367.358.500,00	2.340.099.500,00	98,85
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15.393.400,00	13.157.400,00	85,47

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50.760.000,00	48.566.000,00	95,68
4	<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>475.590.000,00</b>	<b>447.266.731,00</b>	<b>94,04</b>
4.1	<b>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>475.590.000,00</b>	<b>447.266.731,00</b>	<b>94,04</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	462.874.200,00	435.977.931,00	94,19
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.715.800,00	11.288.800,00	88,78
5	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	<b>812.776.500,00</b>	<b>607.067.218,00</b>	<b>74,69</b>
5.1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>812.776.500,00</b>	<b>607.067.218,00</b>	<b>74,69</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	812.776.500,00	607.067.218,00	74,69
6	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>2.099.516.800,00</b>	<b>1.960.814.733,00</b>	<b>93,39</b>
6.1	<b>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>2.099.516.800,00</b>	<b>1.960.814.733,00</b>	<b>93,39</b>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.588.955.800,00	1.556.287.890,00	97,94

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	31.793.000,00	30.551.000,00	96,09
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	478.768.000,00	373.975.843,00	78,11
		<b>13.297.364.645,00</b>	<b>12.124.757.674,00</b>	<b>91,18</b>

Sumber : Data Diolah

### B.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kinerja

Setelah Perubahan Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar (BAKESBANGPOL) Kabupaten Banjar Tahun 2025 untuk melaksanakan 6 (ENAM) Program , 12 (Dua belas) Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan sebesar Rp. 13.297.364.645,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.124.757.674,- (91,18%) dan realisasi kinerja dari Sasaran Pertama, “Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik dan penguatan lembaga demokrasi di daerah” memiliki indikator Indeks Demokrasi Indonesia dengan target 80.15% dan realisasi 80,82% sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100.8%.

Sasaran Kedua, “Meningkatnya Kapasitas dan Kontribusi Organisasi Kemasyarakatan” indikatornya berjumlah satu yakni Indeks Kinerja Ormas. Pada tahun 2025 target indikatornya adalah 72 persen dengan realisasi sebesar 74.17 persen sehingga persentase capainya adalah sebesar 103 persen.

Sasaran Ketiga, “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” indikatornya berjumlah satu yakni Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 target indikatornya adalah 78,25 persen dengan realisasi sebesar 77.53 persen sehingga persentase capainya adalah sebesar 99,07 persen.

**Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah	indeks Demokrasi indonesia	80.15	Persen	80.82	100.84%	7.037.780.200,00	6.451.753.338,00	91,67
2	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	72	Nilai Indeks	74.14	102.97%	475.590.000,00	447.266.731,00	94,04
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.25	Persen	77.53	99.08%	5.783.994.445,00	5.225.737.605,00	90,35
4	Meningkatnya kepatuhan dan Kinerja Intern perangkat daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84.85	Persen	85.57	100.85%	5.783.994.445,00	5.225.737.605,00	90,35
5	terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan ,Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	Persen	100.00	100.00%	33.086.900,00	32.114.650,00	97,06
6	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	100.00%	4.314.199.800,00	3.821.412.519,00	88,58
7	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	Persen	100	100.00%	48.000.000,00	47.296.605,00	98,53
8	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	Persen	30	30.00%	398.363.745,00	393.100.796,00	98,68
9	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	Persen	100	100.00%	286.502.000,00	284.374.100,00	99,26
10	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	100	Persen	100	100.00%	404.538.000,00	349.178.000,00	86,32

No.	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target		Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
11	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	100	Persen	100	100.00%	299.304.000,00	298.260.935,00	99,65
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	Persen	100	100.00%	1.691.975.000,00	1.482.048.487,00	87,59
13	Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di Bidang Ekososbud yang dikeluarkan sesuai standar	100	Persen	100	100.00%	812.776.500,00	607.067.218,00	74,69
14	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80	Persen	90.28	113.00%	1.691.975.000,00	1.482.048.487,00	87,59
15	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	80	Persen	85.25	106.56%	812.776.500,00	607.067.218,00	74,69
16	Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	100	Persen	100	100.00%	812.776.500,00	607.067.218,00	74,69
17	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100	Persen	100	100.00%	2.433.511.900,00	2.401.822.900,00	98,70
18	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	40	Persen	40.21	100.53%	475.590.000,00	447.266.731,00	94,04
19	Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat	Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang terlaksana	100	Persen	100	100.00%	2.433.511.900,00	2.401.822.900,00	98,70
20	Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	90.7	Persen	91.68	101.08%	475.590.000,00	447.266.731,00	94,04
21	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100	Persen	100	100.00%	2.099.516.800,00	1.960.814.733,00	93,39
22	Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan	100	Persen	100	100.00%	2.099.516.800,00	1.960.814.733,00	93,39

No.	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
		kerjasama intelijen							
23	Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100.00%	2.099.516.800,00	1.960.814.733,00	93,39

Sumber : data diolah

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik telah berjalan dengan sangat baik. Pelaksanaan kebijakan yang meliputi ketahanan ideologi dan kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi, kemasyarakatan, serta politik dalam negeri telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar menetapkan tiga sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik dan penguatan lembaga demokrasi di daerah; meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan; serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Hasil analisis terhadap capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa ketiga sasaran strategis tersebut berada pada kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata capaian sebesar 100 persen.

Pada sasaran strategis pertama, yaitu “Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik dan penguatan lembaga demokrasi di daerah”, capaian Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan kinerja yang melampaui target. Dengan target sebesar 80,15 persen dan realisasi 80,82 persen, capaian kinerja mencapai 100,8 persen. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program strategis, antara lain Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, serta Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. Untuk mendukung sasaran tersebut, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp7.037.780.200,- dengan realisasi sebesar Rp6.451.753.338,- atau 91,67 persen, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang baik dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.

Pada sasaran strategis kedua, yaitu “Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan”, indikator Indeks Kinerja Ormas juga menunjukkan capaian yang sangat baik. Dengan target sebesar 72 persen dan realisasi 74,17 persen, capaian

kinerja mencapai 103 persen. Pencapaian ini ditunjang melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp475.590.000,- dengan realisasi Rp447.266.731,- atau 94,04 persen, yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah.

Sementara itu, pada sasaran strategis ketiga, yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, capaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan hasil yang mendekati target yang ditetapkan. Dengan target 78,25 persen dan realisasi 77,53 persen, capaian kinerja mencapai 99,07 persen. Capaian tersebut didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.783.994.445,- dan realisasi sebesar Rp5.225.737.605,- atau 90,35 persen. Hal ini menunjukkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

## **B. SARAN-SARAN**

Secara keseluruhan, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, baik dari sisi pencapaian indikator kinerja utama maupun dari aspek pengelolaan anggaran. Capaian ini mencerminkan sinergi antara perencanaan, pelaksanaan program, dan pengendalian kinerja, serta menjadi dasar yang kuat bagi upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bakesbangpol Kabupaten Banjar di tahun mendatang, maka akan dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan FKDM, FKUB, kecamatan, dan instansi terkait, guna memperkuat deteksi dini serta tindak lanjut potensi konflik di daerah.
2. Memperbaiki konsistensi data kinerja, terutama antara laporan periodik dan aplikasi SIMONDALEV, agar pengukuran dan pelaporan kinerja lebih akurat dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kinerja.
3. Melanjutkan pembinaan organisasi kemasyarakatan secara sederhana dan berkelanjutan, terutama pada aspek kelembagaan dan kepatuhan administrasi, untuk meningkatkan kontribusi ormas dalam menjaga stabilitas sosial.

# LAMPIRAN

<https://tinyurl.com/LampiranLKJiPbakesbangpol2025>

